

SKRIPSI

PENGARUH IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR: 443/KEP.241-HUK/2020 TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG

Disusun Oleh :

NAMA : PISKA RIZKIANI
NPM : E.1735223032
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
STIA Sebelas April Sumedang



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG
2021**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi:

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 443/KEP.241-HUK/2020 TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA
PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMEDANG**

Disusun Oleh:

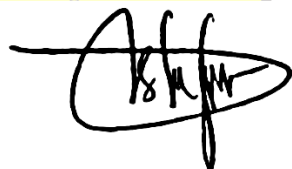
**NAMA : PISKA RIZKIANI
NPM : E.1735223032
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

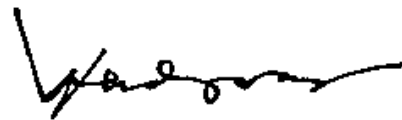
Pembimbing Skripsi :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



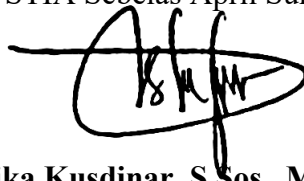
Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si.
NIDN: 04-3012-7102



Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 04-2712-8801

Mengetahui,

Ketua STIA Sebelas April Sumedang,



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si.
NIDN: 04-3012-7102

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi:

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 443/KEP.241-HUK/2020 TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA
PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMEDANG**

Disusun Oleh:

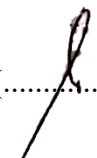
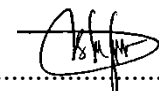
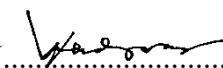
NAMA : PISKA RIZKIANI
NPM : E.1735223032
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah mempertahankan Skripsi ini dihadapan Panitia Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

Hari : Sabtu
Tanggal : 14 Agustus 2021
Pukul : 13.00 s.d selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua Sidang	: Dadan Setia Nugraha, S.Sos.,M.Si.	(..... )
Sekretaris	: Lalas Sulastris, S.Sos.,M.Si.	(..... )
Pembimbing I	: Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si.	(..... )
Pembimbing II	: Shofwan Hendryawan, S.Pd.,M.Pd.	(..... )

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : PISKA RIZKIANI
NPM : E.1735223032
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
**JUDUL : PENGARUH IMPLEMENTASI KEPUTUSAN
BUPATI SUMEDANG NOMOR: 443/KEP.241-
HUK/2020 TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA
PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
SUMEDANG**

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan koreksi Dosen Penguji
pada Ujian Sidang Skripsi

No	Halaman	Materi Perbaikan	Ket.
1.	52-53	Tambahkan no item di tabel operasional variabel	Penguji I
2.	52	Tambahkan indikator di variabel X dimensi no 5	
3.	118-119	Tambahkan kesimpulan	Penguji II
	119-120	Tambahkan saran dari indikasi masalah awal penelitian	Penguji III

Tim Penguji Skripsi:

Penguji I : Deden Haria Garmana, S.IP., M.Si. (..........)

Penguji II : Dhesti Widya N.N., S.Sos., M.Si. (..........)

Penguji III : Hj. Fepi Febianti, S.Sos., M.I.Kom. (..........)

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PENGARUH IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR: 443/KEP.241-HUK/2020 TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG”** ini, sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, Juni 2021
Yang membuat pernyataan,

PISKA RIZKIANI
E.1735223032

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

ABSTRAK

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 443/KEP.241-HUK/2020 TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA
PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMEDANG**

Disusun oleh:

NAMA : PISKA RIZKIANI
NOMOR POKOK : E.1735223032
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

173 halaman, 5 bab, 52 tabel, 2 gambar, 6 lampiran
Daftar Pustaka: 43 buku, 3 dokumen dan 4 skripsi penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 terhadap efektifitas kerja pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 mengatur tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Sedangkan efektifitas kerja pegawai merupakan suatu ukuran apakah organisasi telah berjalan dengan baik atau tidak dalam mencapai tujuannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh, dengan jumlah populasi 46 orang sehingga didapat jumlah sampel 46 orang responden.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 berada pada kriteria Baik dengan prosentase sebesar 79,47% Sementara itu, efektifitas kerja pegawai berada pada kriteria Baik dengan prosentase sebesar 76,89%. Adapun hubungan implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 dengan efektifitas kerja pegawai, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,66, dalam kriteria Kuat. Dan pengaruh implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 dengan efektifitas kerja pegawai diperoleh nilai koefisien sebesar 43,9%, sisanya sebesar 56,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti (*faktor epsilon*).

Kata kunci: Implementasi implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020, Efektivitas Kerja Pegawai

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh Sidang Usulan Proposal STIA Sebelas April Sumedang. Dalam Penulisan Proposal Penelitian ini tidak lepas dari segala hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Penelitian ini.

Ucapan terimakasih ditunjukkan terutama kepada :

1. Yth. Bapak H. Yuyun Hidayat, Drs. Selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Proposal Penelitian ini
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd.,M.Pd. Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
5. Yth. Ibu Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si. Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

6. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd.,M.Pd.. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Proposal Penelitian ini.
7. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang yang telah membekali ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Yth. Bapak Endah Kusyaman Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
9. Yth. Ibu Windayani, SE. Bagian Staff Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
10. Yth. Seluruh Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
11. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dorongan moril maupun materil.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa STIA Sebelas April Sumedang serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Semoga segala bimbingan, bantuan, nasehat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Sumedang, Juni 2021

Penulis

PISKA RIZKIANI

NPM. 1735223032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
1. Kegunaan Teoritis	15
2. Kegunaan Praktis.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi Negara	16
B. Ruang Lingkup Administrasi Negara.....	17
1. Manajemen	17
2. Organisasi	18
C. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian.....	19
D. Kebijakan Publik	21
1. Pengertian Kebijakan Publik	21
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik.....	22
E. Implementasi Kebijakan Publik	23
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	23
2. Teori-teori Implementasi Kebijakan Publik	25
3. Dimensi Implementasi Kebijakan Publik	26
F. Manajemen Sumber Daya Manusia	31

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia	31
2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia.....	32
H. Efektivitas Kerja Pegawai	34
1. Pengertian Efektivitas Kerja Pegawai	34
2. Alat Ukur Efektivitas Kerja Pegawai	35
3. Dimensi Efektivitas Kerja Pegawai.....	36
I. Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Kerja Pegawai	39
J. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 .	41
K. Kajian Penelitian Terdahulu.....	42
L. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	45
1. Kerangka Pemikiran	45
2. Hipotesis	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	50
B. Definisi Operasional dan Operasional Variabel.....	51
C. Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel Penelitian.....	53
1. Populasi	53
2. Teknik Sampling	54
3. Sampel Penelitian	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	56
1. Teknik Pengolahan Data	56
a. Uji Validitas Instrumen.....	57
b. Uji Realibilitas Instrumen	69
2. Teknik Analisis Data	72
a. Perhitungan Porsentase	72
b. Uji Normalitas Data	73
c. Uji Koefisien Korelasi	74
d. Uji Signifikasi	75
e. Uji Koefisien Determinasi.....	75

F. Lokasi dan Jadwal Penelitian	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	78
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang	78
2. Sumber Daya	81
3. Telaahan Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023	86
4. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	88
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	90
1. Perhitungan Prosentase dan Pembahasan	90
a. Analisis Variabel Implementasi Kebijakan Publik.....	90
b. Analisis Variabel Efektivitas Kerja Pegawai.....	102
2. Uji Normalitas Data dan Pembahasan.....	113
3. Uji Koefisien Korelasi dan Pembahasan.....	114
4. Uji Signifikasi dan Pembahasan.....	116
5. Uji Koefisien Determinasi dan Pembahasan	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Lampiran Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 ..	9
Tabel 2.1	Kajian Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1	Operasional Variabel Implementasi Kebijakan Publik.....	52
Tabel 3.2	Operasional Efektivitas Kerja Pegawai	53
Tabel 3.3	Populasi Penelitian.....	54
Tabel 3.4	Sampel Penelitian	56
Tabel 3.5	Bobot Nilai.....	56
Tabel 3.6	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Implementasi Kebijakan Publik	60
Tabel 3.7	Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi Kebijakan	62
Tabel 3.8	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Efektivitas Kerja Pegawai	65
Tabel 3.9	Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Kerja Pegawai.....	67
Tabel 3.10	Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Variabel Implementasi Kebijakan Publik.....	71
Tabel 3.11	Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Variabel Efektivitas Kerja Pegawai.....	72
Tabel 3.12	Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi.....	74
Tabel 3.13	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	77
Tabel 4.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	81
Tabel 4.2	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Golongan.....	82
Tabel 4.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	83
Tabel 4.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	84
Tabel 4.5	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d TA. 2017	86
Tabel 4.6	Kriteria Nilai Berdasarkan Persentase	90
Tabel 4.7	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 1	91
Tabel 4.8	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 2	91
Tabel 4.9	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 3	92
Tabel 4.10	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 4	92
Tabel 4.11	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 5	93
Tabel 4.12	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 6	93
Tabel 4.13	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 7	94
Tabel 4.14	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 8	95
Tabel 4.15	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 9	95
Tabel 4.16	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 10	96

Tabel 4.17	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 11	96
Tabel 4.18	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 12	97
Tabel 4.19	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 13	97
Tabel 4.20	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 14	98
Tabel 4.21	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 15	99
Tabel 4.22	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 16	99
Tabel 4.23	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 17	100
Tabel 4.24	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 18	100
Tabel 4.25	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 19	101
Tabel 4.26	Frekuensi Jawaban Responden Variabel X No Item 20	101
Tabel 4.27	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 1	102
Tabel 4.28	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 2	103
Tabel 4.29	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 3	103
Tabel 4.30	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 4	104
Tabel 4.31	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 5	104
Tabel 4.32	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 6	105
Tabel 4.33	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 7	105
Tabel 4.34	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 8	106
Tabel 4.35	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 9	106
Tabel 4.36	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 10	107
Tabel 4.37	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 11	107
Tabel 4.38	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 12	108
Tabel 4.39	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 13	109
Tabel 4.40	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 14	109
Tabel 4.41	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 15	110
Tabel 4.42	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 16	110
Tabel 4.43	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 17	111
Tabel 4.44	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 18	111
Tabel 4.45	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 19	112
Tabel 4.46	Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y No Item 20	112
Tabel 4.47	Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Variabel Implementasi Kebijakan Publik.....	113
Tabel 4.48	Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Variabel Efektivitas Kerja Pegawai	114
Tabel 4.49	Hasil Uji Korelasi	115
Tabel 4.50	Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi.....	115
Tabel 4.51	Hasil Uji Signifikasi.....	116
Tabel 4.52	Hasil Uji Koefisien Determinasi	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Berpikir	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang	80



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Ketua STIA Sebelas April Sumedang Nomor: 0032/SK/D-STIA/UN/K/1/2021
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Lampiran 3 Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020
Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
- Lampiran 4 Angket Penelitian
- Lampiran 5 Hasil Perhitungan Dengan Menggunakan SPSS
- Lampiran 6 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Organisasi terbentuk dari beberapa manusia yang memiliki tujuan yang sama, mereka berkelompok dan bersama-sama bekerjasama agar tujuan mereka dapat tercapai. Organisasi merupakan wadah tempat berkumpulnya dua orang manusia atau lebih karena adanya kesamaan tujuan. Dalam pelaksanaannya sebuah organisasi akan dipimpin oleh seseorang yang dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas seorang pemimpin dalam mengelola dan mengarahkan organisasi.

Organisasi pada umumnya memiliki banya sekali jenis baik itu organisasi swasta ataupun organisasi pemerintah, organisasi pada pemerintahan biasanya disebut sebagai sebuah instansi pemerintah. Pemerintah pusat akan membentuk instansi-instansi daerah sebagai bagian instansi pusat yang akan membantu pelaksanaan tugas kenegaraan dan berkaitan langsung dengan masyarakat.

Pembentukan instansi pemerintah dilaksanakan pada setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia dengan tingkatan-tingkatan dan tugas-tugas yang berbeda. Begitu pula pada Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari wilayah kota di Indonesia tentunya memiliki instansi pemerintahan yang bertugas sesuai dan searah dengan kebijakan pusat.

Kabupaten Sumedang dipimpin oleh seorang Bupati dan wakilnya sebagai pemimpin terpilih Kabupaten Sumedang dan melaksanakan segala bentuk tanggungjawab yang berkaitan dengan Kabupaten Sumedang. Dalam

pelaksanaanya, pemerintah Kabupaten Sumedang dibantu oleh Dinas-Dinas yang telah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten sebagai bagian dari peraturan pusat.

Selanjutnya Dinas-Dinas pada Kabupaten Sumedang menjalankan seluruh peraturan dan keputusan Bupati Sumedang yang searah dan sejalan dengan Pemerintah Pusat. Salah satu Dinas pada Kabupaten Sumedang yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). DPMD Kabupaten Sumedang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016, DPMD Kabupaten Sumedang telah melaksanakan banyak program-program unggulan yang searah dengan visi dan misi Bupati dalam mengelola Kabupaten Sumedang.

DPMD ini bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Fungsi DPMD yaitu mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga keuangan, dan kepegawaian dinas; Menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada DPMD; Mengendalikan kegiatan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia masyarakat pedesaan; Mengendalikan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa; Mengendalikan kegiatan pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; Mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

DPMD dalam melaksanakan tugas dan programnya, harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Sumber daya merupakan suatu tenaga yang dapat menjadikan segala sesuatu bergerak maju dan mencapai apa yang diinginkan. Sumber daya manusia pada sebuah organisasi, merupakan tenaga dari manusia itu sendiri untuk menjalankan organisasi sedemikian rupa agar mampu mencapai tujuan, sumber daya manusia akan baik apabila diatur dan diarahkan dengan baik oleh manajemen sumber daya manusia pada DPMD yang baik pula, sehingga dapat searah dan sesuai dengan tujuan serta program DPMD

. Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah seni dalam mengatur tenaga organisasi yaitu manusia untuk bergerak sesuai dengan tujuan organisasi. Tugas manajemen sumber daya manusia, yaitu mulai dari merekrut pegawai dan menyeleksi agar sesuai dengan visi organisasi, mengarahkan pegawai dan membuat aturan kerja yang tepat dan sesuai, serta bertanggung jawab atas pembentukan kelompok-kelompok kerja yang solid dan kuat.

Fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mempertahankannya. Manajemen sumber daya manusia juga harus mampu menciptakan sistem kerja yang stabil dan baik, juga harus mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi para pegawai agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik

Manajemen sumber daya manusia yang baik akan menciptakan efektivitas kerja yang baik pula pada DPMD. Yang dimaksud dengan efektivitas kerja adalah keselarasan atau kesesuaian penyelesaian tugas dengan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya, dimana kesesuaian tersebut dapat berupa ketepatan waktu penyelesaian tugas, jumlah produktivitas dan lain sebagainya.

Efektivitas pada sebuah organisasi dapat dipengaruhi oleh banyak hal beberapa diantaranya yaitu, waktu, motivasi, perlengkapan dan fasilitas serta evaluasi kerja. Efektivitas kerja dapat diukur melalui beberapa hal yaitu prestasi kerja pegawai dan kepuasan kerja pegawai. Efektivitas dari sebuah organisasi akan memberikan dampak yang baik bagi organisasi, apabila organisasi tersebut adalah sebuah dinas maka akan berdampak pada keberhasilan suatu program yang selanjutnya akan dirasakan oleh masyarakat.

Begitu pula pada DPMD Kabupaten Sumedang Efektivitas kerja yang baik merupakan salah satu hal yang harus tercapai agar suatu program dapat tercapai. Namun pada pencapaiannya efektivitas kerja pegawai dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal, DPMD sebagai suatu instansi pemerintah tentunya harus selalu taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia ataupun di Kabupaten Sumedang.

Bupati Sumedang sebagai seorang pemimpin memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang membantu pemerintah pusat. Salah satu pengambilan keputusan oleh pemerintah yaitu pada saat terjadi bencana alam. Bencana alam pada umumnya merupakan hal yang tidak bisa diprediksi dari jauh hari sehingga pemerintah hanya bisa membuat penanggulangan-penanggulangan pada saat bencana telah dirasa memberi dampak pada masyarakat. Salah satu bencana alam yang hingga saat ini masih dalam proses penanganan yaitu bencana alam *Corona Virus Disease 2019* atau biasa disebut COVID-19, Merupakan penyakit yang

berasal dari Wuhan China dan dapat dengan mudah menyebar melalui udara dan tetesan atau droplet dari orang yang terinfeksi ketika bersin atau batuk.

Pada saat ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang telah terinfeksi COVID-19. Dalam penanganannya pemerintah terus berusaha menekan penyebaran virus agar jumlah kasus tidak bertambah, penanganan kasus COVID-19 dilakukan dengan menemukan orang-orang yang telah terinfeksi untuk selanjutnya diisolasi dan diobati, guna memutus rantai penularan yang terus menyebar. Adanya COVID-19 ini tentunya berpengaruh terhadap kegiatan dan aktivitas masyarakat pada segala aspek, sehingga harus selalu menjaga diri dengan memakai alat pelindung berupa masker dan selalu mencuci tangan serta menjaga jarak dengan orang lain. Dalam pelaksanaannya pemerintah dengan sigap menurunkan seluruh personil TNI dan POLRI untuk membantu menertibkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah.

Percepatan penanganan COVID-19 ini dibantu oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai bagian dari pemerintah pusat, dengan memutuskan peraturan-peraturan yang selaras dan sejalan dengan pemerintah pusat dan berdasar pada peraturan atau undang-undang sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, baik itu peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan gubernur.

Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari wilayah Indonesia dan dipimpin oleh Bupati memiliki peran penting dalam penanganan COVID-19. Dalam pelaksanaannya, Bupati Sumedang telah mengeluarkan beberapa Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, salah satunya yaitu Keputusan Bupati Sumedang Nomor:

443/KEP.241-HUK/2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 merupakan bagian dari penanganan COVID-19 yang dibuat mengingat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintahan pusat dan provinsi yang sudah ada sebelumnya. DPMD sebagai bagian dari instansi pemerintahan Kabupaten Sumedang, harus taat terhadap Keputusan Bupati tersebut. Namun dalam pelaksanaannya Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 ini berpengaruh terhadap efektivitas pegawai dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan pada hasil observasi pra penelitian, penulis mengemukakan beberapa gejala yang merujuk pada rendahnya efektivitas kerja pegawai pada DPMD Kabupaten Sumedang. Hal ini dapat diketahui dari adanya indikasi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas yang terhambat atau telat karena jaringan internet yang tidak mendukung bagi para pegawai yang melaksanakan WFH. Contohnya pada pelaksanaan kegiatan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Berdasarkan hasil wawancara pada pegawai Bidang Keuangan dan Aset Desa DPMD
2. Pemberian tugas yang kurang tepat menurut salahsatu pegawai Bidang Keuangan dan Aset Desa DPMD, yaitu tugas hanya dibebankan pada satu orang saja, contohnya seperti pelaksanaan pembinaan untuk administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh pegawai itu-itu saja sehingga

pegawai tersebut kewalahan dalam melaksanakan tugasnya dan menghambat pencapaian tujuan program

3. Pegawai jarang melakukan evaluasi langsung atau mengkaji hasil kerja bersama-sama, berdasarkan pada keterangan menurut salahsatu pegawai DPMD pada bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, hal ini memperkecil kemungkinan pegawai untuk mengetahui alternatif penyelesaian tugas yang lebih tepat dan lebih cepat serta hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan tugasnya. Dapat dibuktikan dengan tidak terselesaikannya pekerjaan dengan cepat dan tidak seluruh pegawai selalu ada di kantor

Adanya indikasi masalah tersebut diduga dipengaruhi oleh implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya indikasi masalah pada hasil observasi pra penelitian di bawah ini:

1. Kurangnya pemenuhan alat penunjang dalam implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020, contohnya pada perlengkapan serta peralatan kerja pegawai untuk melaksanakan WFH, sehingga pegawai tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Kurangnya partisipasi pegawai dalam implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pegawai yang kurang paham atau tidak mengetahui isi dari Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 .

3. Penyelesaian tugas atau pekerjaan yang kurang kondusif karena adanya tingkat adaptasi yang tinggi terhadap implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020, contohnya pelaksanaan pekerjaan luar kota yang tertunda dan dibatalkan atau dilakukan secara online dikarenakan adanya pembatasan mobilitas dalam provinsi

Ketiga indikasi masalah dari implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 di atas didukung oleh tabel dibawah ini:



Tabel 1.1
Lampiran Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 Tentang
Pemberlakuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

NO	SEKTOR	TEMPAT/MULAI AKTIVITAS		ADAPTASI KEBIASAAN BARU	PERANGKAT DAERAH PEMBERI PERSETUJUAN
1	2	3		4	5
1	Perjalanan	Mobilitas (2 Juni 2020)		Pembatasan dalam provinsi	Dinas Perhubungan
2	Kesehatan	Isolasi/Karantina Kesehatan (2 Juni 2020)		Normal	Dinas Kesehatan
3		Rumah Sakit (2 Juni 2020)	Jam Operasional	Normal	
			Jenis Layanan	Sebagian poliklinik rawat jalan dibuka, rawat inap normal	
4		Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (2 Juni 2020)	Jam Operasional	Normal	
			Jumlah Pengunjung	75% dari kapasitas layanan pasien	
			Jenis Layanan	Semua layanan kesehatan buka	
5	Jasa	Perkantoran (2 Juni 2020)	Jam Operasional	Normal	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan
			Jumlah Pegawai	25% Pegawai WFH dengan jadwal piket	
6		Hotel (2 Juni 2020)	Jenis Layanan	Hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

NO	SEKTOR	TEMPAT/MULAI AKTIVITAS		ADAPTASI KEBIASAAN BARU	PERANGKAT DAERAH PEMBERI PERSETUJUAN
1	2	3		4	5
7		Perbankan (2 Juni 2020)	Jam Operasional	Pembatasan jam operasional (08.00-14.00) dan melayani transaksi <i>online</i>	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan
			Jumlah Pegawai	25% Pegawai WFH dengan jadwal piket	
			Jumlah Pengunjung	Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas	
8		Lokasi Wisata (9 Juni 2020)	Jam Operasional	Normal	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
			Jumlah Pengunjung	Kunjungan individual bukan rombongan	
9	Manufaktur	Industri (2 Juni 2020)	Jam Operasional	Beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah pekerja	Jumlah pekerja yang masuk tidak lebih dari 75% dari kapasitas gedung	
10	Perdagangan	Warung Makan/ Restoran/Café (2 Juni 2020)	Jam Operasional	Normal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Pengunjung	Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas, dengan mengutamakan layanan pesan antar	
11		Mall (9 Juni 2020)	Jam Operasional	Dibuka terbatas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Pengunjung	Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas gedung	

NO	SEKTOR	TEMPAT/MULAI AKTIVITAS		ADAPTASI KEBIASAAN BARU	PERANGKAT DAERAH PEMBERI PERSETUJUAN
1	2	3		4	5
12		Supermarket bahan Makanan Pokok (2 Juni 2020)	Jam Operasional	Pembatasan jam operasional [09.00-18.00]	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Pengunjung	Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas	
13		Minimarket (2 Juni 2020)	Jam Operasional	Pembatasan jam operasional [08.00-18.00]	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Pengunjung	Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas	
14		Pasar Rakyat (2 Juni 2020)	Jam Operasional	Pembatasan jam operasional [05.00-16.00]	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Pengunjung	Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas	
15	Pendidikan	Sekolah	Jam Operasional	Ditutup (sampai ada ketentuan lebih lanjut)	Dinas Pendidikan
			Metode Belajar	Melaksanakan pembelajaran secara <i>online</i>	
16	Area Publik	Taman (21 Juni 2020)	Jam Operasional	Pembatasan jam operasional [06.00-09.00 dan 15.00-18.00]	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Jumlah Pengunjung	Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas	
17		Perpustakaan	Jam Operasional	Ditutup (sampai ada ketentuan lebih lanjut)	Dinas Arsip dan Perpustakaan
			Jumlah Pengunjung		

NO	SEKTOR	TEMPAT/MULAI AKTIVITAS		ADAPTASI KEBIASAAN BARU	PERANGKAT DAERAH PEMBERI PERSETUJUAN
1	2	3		4	5
18		Terminal (2 Juni 2020)	Jam Operasional	Pembatasan jam operasional (05.00-19.00)	Dinas Perhubungan
			Jumlah Pengunjung	Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas	
19		Tempat Ibadah (Masjid, Gereja, Wihara, Pura, Kelenteng) (2 Juni 2020)		Pembatasan jumlah jamaah maksimum 50% dari kapasitas tempat ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan
20		Penyelenggaraan Acara, Hiburan dan Olahraga Berkelompok (21 Juni 2020)	Penyelenggara acara, hiburan dan olahraga wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang disertai kesiapan protokol kesehatan	Penyelenggara acara, hiburan dan olahraga wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang disertai kesiapan protokol kesehatan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
21		Salon, Spa, Barbershop	Ditutup (sampai ada ketentuan lebih lanjut) Jumlah Pengunjung	Ditutup (sampai ada ketentuan lebih lanjut)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

SEBELAS APRIL
SUMEDANG

Berdasarkan indikasi efektivitas kerja pegawai dan implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja pegawai berkaitan dengan implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020, rendahnya efektivitas kerja pegawai dapat dipengaruhi atau disebabkan oleh implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PENGARUH IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR: 443/KEP.241-HUK/2020 TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan tersebut, selanjutnya akan penulis rinci lagi dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Seberapa baik Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang ?
2. Seberapa Tinggi Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang ?

3. Adakah hubungan antara Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 dengan Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang ?
4. Seberapa besar pengaruh Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa baik Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui seberapa tinggi Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui hubungan antara Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 dengan Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

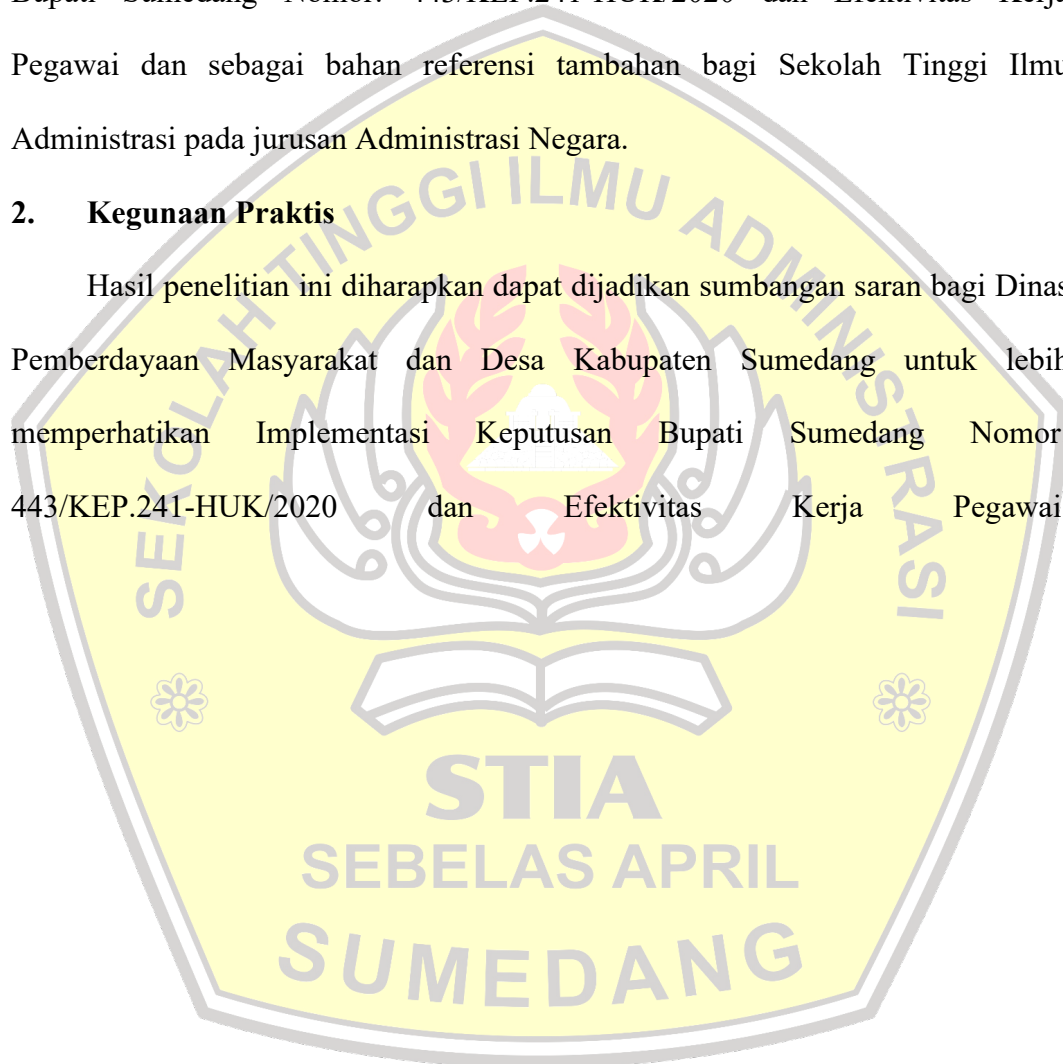
D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis pada bidang administrasi khususnya yang berkenaan dengan Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 dan Efektivitas Kerja Pegawai dan sebagai bahan referensi tambahan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi pada jurusan Administrasi Negara.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan saran bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang untuk lebih memperhatikan Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 dan Efektivitas Kerja Pegawai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi Negara

Pada umumnya administrasi negara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang di laksanakan oleh aparatur negara dalam lingkup kenegaraan dengan maksud mencapai tujuan negara. Berikut ini pengertian administrasi negara menurut beberapa para ahli :

Menurut Dimock dan Dimock (dalam Iskandar, 2014:17) :

Yang dimaksud administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmupengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun digerakkan dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian dari ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatuproses.

Sejalan dengan pendapat di administrasi negara menurut Waldo (dalam Iskandar, 2014:18) yaitu :

Administrasi sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Administrasi Negara merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Sedangkan menurut Handyaningrat (2012:3) yaitu "Kegiatan/proses/usaha di bidang kenegaraan".

Berdasarkan pada pengertian administrasi negara di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kenegaraan yang didalamnya terdapat proses kerja sama, perencanaan serta pelaksanaanya guna mencapai tujuan negara.

B. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Menurut Newman (dalam Handayaniingrat, 2012:20) mengemukakan bahwa pekerjaan seorang administrator atau manager dibagi dalam lima proses yaitu :

1. Perencanaan (*planning*).
2. Pengorganisasian (*organizing*).
3. Pengumpulan sumber (*assembling resources*).
4. Pengendalian kerja (*supervising*).
5. Pengawasan (*controlling*).

Selanjutnya Fayol (dalam Winardi, 2010:4) memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu :

1. Merencanakan.
2. Mengorganisasikan.
3. Memimpin.
4. Melaksanakan pengkoordinasian.
5. Melaksanakan pengawasan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari administrasi negara adalah Kegiatan perencanaan, pengelompokan, memimpin pelaksanaan perencanaan, melayani, menyelesaikan masalah yang di dalamnya terdapat suatu sistem kerjasama yang erat yang dilaksanakan dalam kepentingan negara.

1. Manajemen

Manajemen sebagai bagian dari ruang lingkup administrasi memiliki fungsi atau peran untuk mengelola dan mengatur segala sumber daya yang ada pada suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi.

Menurut Hasibuan (2012 : 2) pengertian manajemen yaitu:

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu“.

Selanjutnya menurut G.R.Terry (Hasibuan, 2012:2) menyatakan bahwa:

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu seni yang mengatur proses-proses yang ada dalam organisasi dapat berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi.

Selanjutnya menurut Terry (Silalahi, 2016:165) membagi fungsi manajemen menjadi :

1. *Planning* (perencanaan)
2. *Organizing* (pengorganisasian)
3. *Actuating* (penggerakkan)
4. *Controlling* (pengawasan)

Fungsi lainnya menurut Siagian (Silalahi, 2016: 165) mengatakan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut :

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Motivating* (Motivasi)
4. *Controlling* (Pengawasan)
5. *Evaluating* (Evaluasi)

Sedangkan fungsi manajemen menurut A.F Stoner dan P.R Robbins (Silalahi, 2016:165) adalah sebagai berikut :

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Leading* (Pembimbingan)
4. *Controlling* (Pengawasan)

Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari manajemen yaitu berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan evaluasi.

2. Organisasi

Atmosudirjo (Hasibuan, 2012:121) menyatakan bahwa:

“Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu”.

Selanjutnya menurut Weber (Silalahi, 2016:124) yaitu:

“Organisasi merupakan tata hubungan setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya”.

Dari pengertian organisasi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu tempat terjalinnya interaksi antar individu dan dapat berupa kerjasama berdasarkan tugas pokok dan fungsinya

Selanjutnya menurut Wursanto (2011:219) prinsip organisasi adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai tujuan yang jelas.
2. Mempunyai kesatuan perintah.
3. Ada keseimbangan.
4. Ada pendistribusian pekerjaan.
5. Ada rentangan pengawasan.
6. Ada pelimpahan wewenang.
7. Ada departementalisasi.
8. Ada penempatan pegawai yang tepat.
9. Ada koordinasi.
10. Ada balas jasa yang memuaskan.

Maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip-prinsip administrasi yaitu organisasi harus memiliki tujuan yang jelas, memiliki pemimpin, penempatan pegawai yang tepat balas jasa yang memuaskan dan pengawasan serta koordinasi yang baik.

C. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji yaitu berkaitan dengan implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor 443/KEP.241-HUK/2020 dan

efektivitas kerja pegawai, pada variabel implementasi kebijakan publik tersebut erat kaitannya dengan administrasi negara karena merupakan bagian dari fungsi administrasi seperti menurut Fayol (dalam Winardi, 2010:4) memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu :

1. Merencanakan.
2. Mengorganisasikan.
3. Memimpin.
4. Melaksanakan pengkoordinasian.
5. Melaksanakan pengawasan.

Implementasi kebijakan publik tidak akan terlepas dari perencanaan pelaksanaan dan pengawasan sehingga antara administrasi negara dengan implementasi kebijakan publik memiliki kaitan yang erat

Selain itu implementasi kebijakan publik juga merupakan bagian dari proses penyelenggaraan undang-undang seperti pada pengertian administrasi negara menurut Kansil (Suyaman, 2012: 19) sebagai berikut :

1. Sebagai aparatur pemerintah negara, aparatur pemerintah, atau instansi politik (Kenegaraan) meliputi organ yang berada di bawah pemerintah.
2. Sebagai fungsi atau aktivitas yaitu mengurus kepentingan negara
3. Sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-undang atau menjalankan Undang-undang

Dari pengertian administrasi negara menurut Suyaman di atas maka dapat diketahui bahwa efektivitas kerja pegawai sebagai bagian dari tujuan atau capaian sumber daya aparatur pemerintah negara yang perlu diatur sedemikian rupa oleh manajemen pemerintah negara agar dapat mencapai tingkat efektivitas yang baik, yang berarti pemerintah telah berhasil melaksanakan program kerja dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya antara administrasi negara dengan variabel penelitian terdapat kaitan yang erat, hal tersebut dapat dilihat

dari kedua variabel yang merupakan bagian dari ruang lingkup administrasi negara.

D. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya sering diartikan sebagai suatu peraturan umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan pengertian kebijakan menurut Frederickson dan Hart (Tangkilisan, 2011:19), mengemukakan:

kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sejalan dengan pendapat di atas Carl (Agustino, 2014:7) mengungkapkan bahwa:

kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang di arahkan oleh sekelompok pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi sehingga memudahkan tercapainya suatu tujuan bersama.

Sedangkan yang dimaksud dengan publik menurut Inu Kencana dkk (2010:18) yaitu: “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau alternatif yang dibuat oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan pengertian kebijakan publik menurut Bridgman dan Davis (Edi Suharto 2011:3): "Kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai 'whatever government choose to do or not to do'. Artinya, kebijakan publik adalah 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'"

Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn (Edi Suharto, 2011:4) menyatakan bahwa: "Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu"

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik

Dalam pelaksanaan kebijakan publik tentunya dipengaruhi oleh banyak hal seperti menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2011:94) terdapat tiga kelompok berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yaitu:

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*).
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*).
 - a. Kejelasan isi kebijakan.
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan
3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

- b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
- c. Sikap dari kelompok pemilih.
- d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Selain faktor-faktor di atas suatu kebijakan publik juga dapat dipengaruhi oleh 3 faktor sebagai bagian dari isi kebijakan publik seperti menurut Wibawa (Samodra, 2011: 22-23), yaitu:

1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
2. Derajat perubahan yang diinginkan.
3. Kedudukan pembuat kebijakan.
4. (Siapa) pelaksana program.
5. Sumber daya yang dihasilkan

Sehingga dapat disimpulkan suatu kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh banyak hal beberapa diantaranya yaitu permasalahan yang akan dihadapi, suatu undang-undang atau kebijakan yang telah ada, lingkungan dan sumber daya pelaksanaannya.

E. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi pada umumnya sering dikaitkan dengan pelaksanaan suatu kebijakan atau keputusan baik itu dalam organisasi pemerintahan ataupun organisasi swasta. Pengertian implementasi Menurut Syauckani dkk (2016 : 295):

“Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan”

Sedangkan menurut Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan: “Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Selanjutnya menurut Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan: “Implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2011:49), menyebutkan:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya”.

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan kebijakan atau keputusan yang dibuat berdasarkan pada perencanaan atau peraturan sebelumnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik adalah suatu pelaksanaan atau penerapan tindakan-tindakan yang telah disusun oleh pemerintah guna menyelesaikan suatu permasalahan dimana tindakan-tindakan tersebut tertullis dalam suatu kebijakan publik. Pengertian implementasi kebijakan publik tersebut sejalan dengan pendapat menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2017:146-147) yaitu:

Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan

2. Teori-teori Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu teori George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Selanjutnya Teori Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011: 93) menurutnya keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu :

1. Isi kebijakan (*content of policy*) dan
2. Lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel tersebut mencakup:

- a. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan.

- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
- c. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. (Subarsono, 2011: 94), terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*).
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*).
3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas.
4. Karakteristik agen pelaksana.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Teori-teori implementasi kebijakan di atas memiliki setiap variabel yang berbeda pada masing-masingnya, sehingga untuk melaksanakan implementasi kebijakan publik dapat dilihat akan berhasil atau tidaknya dengan menggunakan teori-teori di atas.

3. Dimensi Implementasi Kebijakan Publik

Berikut ini merupakan dimensi dari Implementasi Kebijakan Publik menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:86-87) yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).

4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

a. Kualitas Kebijakan Itu Sendiri

Menurut Dunn (LAN-RI, 2008:41): “Analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas”

Berdasarkan pendapat Dunn di atas dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan suatu kualitas yang baik pada sebuah kebijakan maka diperlukan suatu analisis yang tepat sehingga dapat sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan kebijakan tersebut

Selanjutnya Dunn (2010:117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:

1. Analisis kebijakan prospektif, yaitu berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan.
2. Analisis kebijakan retrospektif, adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan.
3. Analisis kebijakan yang terintegrasi, merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil.

Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas dari suatu kebijakan sangat penting dan berpengaruh terhadap pengimplementasiannya, suatu kebijakan yang berkualitas bisa didapat dari menggunakan beberapa teknik analisis

kebijakan seperti analisis kebijakan prospektif, retrospektif dan terintegrasi. Analisis kebijakan akan membuat isi suatu kebijakan lebih berkualitas.

b. Kecukupan Input Kebijakan (Terutama Anggaran).

Menurut Arikunto (2013:4) input adalah :“Bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi” maksudnya adalah input merupakan suatu bahan atau komponen dasar yang belum diubah sama sekali dan dimasukkan pada suatu sistem dan digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya, kebutuhan dalam hal ini merupakan isi dari kebijakan itu sendiri menurut Wibawa (Samodra Wibawa dkk, 2011: 22-23) isi suatu kebijakan akan meliputi:

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan akan tersusun dengan baik dan dapat diimplementasikan dengan mudah apabila komponen-komponen atau input dari kebijakan itu sendiri memiliki masukan yang tepat sehingga kebijakan itu menjadi lebih jelas sumbernya dan maksud serta tujuannya.

c. Ketepatan Instrumen Yang Dipakai Untuk Mencapai Tujuan Kebijakan

Menurut James yang (Sunggono, 2015:144) masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan apabila :

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah.
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.

- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan.
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi.
- e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan

Selanjutnya menurut Grindle (Subarsono, 2011: 90) Apakah suatu tujuan kebijakan tercapai atau tidak dapat diukur menggunakan dua faktor, yaitu :

- a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian suatu kebijakan diperlukan instrumen sebagai pendukung pelaksanaannya dan instrumen tersebut haruslah tepat sasaran. Pengimplementasian suatu kebijakan tidak akan terlepas dari adanya partisipasi masyarakat, sehingga terimplementasinya suatu kebijakan akan dapat dilihat dari tindakan serta sikap masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari instrumen yang dipilih.

d. Kapasitas Implementor

Menurut Wimer dan Vining (Winarno, 2017:396) menyatakan bahwa seorang implementor harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang diterapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis
2. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
3. Kemampuan implementor, keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

Selanjutnya menurut Van Meter dan Horn (Winarno, 2017:126-151)

faktor-faktor yang mendukung pelaksana/implementor kebijakan yaitu:

- a. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.
- b. Sumber-sumber Kebijakan.
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- d. Karakteristik badan-badan pelaksana. Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi.
- e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- f. Kecenderungan para pelaksana.

Dapat diketahui selain pemilihan instrumen yang tepat diperlukan pula faktor-faktor pendukung agar pengimplementasian kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, diantaranya yaitu suatu kebijakan harus masuk akal agar mudah diterima, lingkungan yang tepat dalam pengimplementasiannya, dan kemampuan implementor tersebut.

e. Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:90): “Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika di implementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan”

Menurut Edwards (dalam Subarsono, 2011: 90) menyatakan bahwa: “Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran”.

Sehingga dalam pengimplementasian sebuah kebijakan dibutuhkan kelompok sasaran yang kondusif terlebih dahulu agar kebijakan dapat dengan mudah dipahami.

f. Kondisi Lingkungan Geografi, Sosial, Ekonomi, Dan Politik

Menurut Undang Undang RI No. 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Grindle (Wibawa, 2011:36) lingkungan dalam implementasi kebijakan publik meliputi tiga indikator, yaitu:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan sebagai tempat bagi implementor untuk melaksanakan tugasnya perlu memiliki keadaan geografis, sosial, ekonomi dan politik yang jelas guna membantu pelaksanaan implementasi kebijakan.

F. Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut MSDM merupakan suatu seni yang digunakan untuk mengatur sumber daya manusia sebagai tenaga pada sebuah organisasi. Berikut ini beberapa pendapat ahli mengenai manajemen sumber daya manusia:

Menurut Mangkunegara (2011:2), menjelaskan bahwa :

Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal didalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai.

Selanjutnya Hasibuan (2012:21), mengemukakan bahwa: “Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja yang efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi, karyawan dan masyarakat”.

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan mengatur orang lain atau sumber daya manusia menggunakan seni hingga dapat dengan mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Terlepas dari mempermudah organisasi dalam mencapai tujuannya berikut ini merupakan beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia menurut para ahli:

Mangkunegara (2011: 2-3) mengemukakan fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Pengadaan tenaga kerja terdiri dari :
 - a. Perncanaan sumber daya manusia.
 - b. Analisis jabatan.
 - c. Penarikan pegawai.
 - d. Penempatan kerja.
 - e. Orientasi kerja.
2. Pengembangan tenaga kerja, mencakup :
 - a. Pendidikan dan pelatihan.
 - b. Pengembangan.
 - c. Penilaian prestasi.
3. Pemberian balas jasa, mencakup :
 - a. Balas jasa langsung.

- b. Balas jasa tidak langsung.
- 4. Integrasi, mencakup :
 - a. Kebutuhan karyawan.
 - b. Motivasi kerja.
 - c. Kepuasan kerja.
 - d. Disiplin kerja.
 - e. Partisipasi kerja.
- 5. Pemeliharaan tenaga kerja, mencakup :
 - a. Komunikasi kerja.
 - b. Kesehatan dan keselamatan kerja.
 - c. Pengendalian konflik kerja.
 - d. Konseling kerja.
- 6. Pemisahan tenaga kerja, mencakup :
 - a. Pemberhentian kerja.

Selanjutnya menurut Moekijat (dalam Hasibuan, 2012:24) fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

- 2. Perencanaan.
- 3. Penilaian prestasi.
- 4. Seleksi.
- 5. Pengembangan dan latihan.
- 6. Administrasi gaji dan upah.
- 7. Lingkungan kerja.
- 8. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
- 9. Hubungan perubahan.
- 10. Kesejahteraan sosial.
- 11. Penilaian dan riset.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, yang di dalamnya terdapat proses perencanaan, seleksi pegawai, pengembangan kemampuan pegawai, komunikasi pegawai dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

G. Efektivitas Kerja Pegawai

1. Pengertian Efektivitas Kerja Pegawai

Efektivitas kerja pada umumnya merupakan suatu ukuran apakah organisasi telah berjalan dengan baik atau tidak dalam mencapai tujuannya. Berikut ini merupakan beberapa pendapat para ahli mengenai efektivitas kerja:

Efektivitas menurut Syamsi (2013:2) yaitu:

“Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut”.

Selanjutnya menurut Handayani (2012:16) mengungkapkan bahwa:

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai yang telah direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi kalau tujuan dan sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif.

Sejalan dengan pendapat di atas Sedarmayanti (2010:59) mengungkapkan efektivitas kerja sebagai berikut :

“Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai”.

Sedangkan menurut Drucker (Moenir, 2010:166) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done”.

(Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil

sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan)

Maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja merupakan suatu alat ukur atas hasil yang akan dicapai pada suatu organisasi, di mana tercapai tidaknya tujuan organisasi dapat terlihat dari tingkat efektivitas kerja pegawainya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Alat Ukur Efektivitas Kerja Pegawai

Menurut pendapat Cambell (Steers, 2015: 46-48) terdapat beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

- a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi; Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
- b. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
- c. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
- d. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- e. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya.
- f. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
- g. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
- h. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
- i. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
- j. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.
- k. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan

Sedangkan menurut Duncan (Steers, 2015:53) mengatakan bahwa terdapat tiga ukuran efektivitas, yaitu:

- a. Pencapaian Tujuan
- b. Integrasi
- c. Adaptasi

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur suatu efektivitas pada sebuah organisasi dapat dilihat berdasarkan Kualitas yang dihasilkan, semangat kerja, adaptasi dan pencapaian tujuannya.

3. Dimensi Efektivitas Kerja Pegawai

Adapun dimensi dari Efektivitas Kerja Pegawai yaitu menurut Sondang P. Siagian (2018:153) :

1. Ukuran Waktu yaitu berapa lama seseorang yang membutuhkan jasa tertentu untuk memperolehnya.
2. Ukuran harga dalam arti berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh jasa yang dibutuhkan itu.
3. Ukuran ketelitian yang menunjukkan apakah jasa yang diberikan akurat atau tidak.
4. Ukuran nilai-nilai sosial budaya, dalam arti cara penghasil jasa menyampaikan produknya kepada kliennya.

a. Ukuran Waktu

Menurut Duncan (Steers, 2015:53) terdapat tujuh indikator yang mempengaruhi efektivitas dalam salah satu indikator tersebut terdapat indikator pencapaian tujuan dengan faktornya yaitu kurun waktu pencapaian. Berdasarkan pendapat duncan tersebut dapat diketahui bahwa waktu merupakan suatu faktor dalam tercapainya efektivitas.

Selanjutnya Handyaningrat (2012:16) mengungkapkan bahwa:

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jelasnya bila sasaran atau

tujuan telah tercapai sesuai yang telah direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi kalau tujuan dan sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif.

Sehingga dapat diketahui bahwa dengan tidak terpenuhinya tugas pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya maka pekerjaan tersebut tidak efektif, dan akan menghambat pekerjaan lain sehingga mengganggu seluruh efektivitas organisasi.

b. Ukuran Harga

Menurut Alma (2011:169): “Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa sehingga menimbulkan kepuasan konsumen”.

Selanjutnya penetapan harga menurut Tjiptono (2017:471) dapat ditetapkan dengan ukuran sebagai berikut:

1. Berbasis Permintaan
2. Berbasis Biaya
3. Berbasis Laba
4. Berbasis Persaingan

Penetapan harga erat kaitanya dengan efektivitas karena dengan harga yang tepat dan hasil didapat sesuai dengan harga maka telah tercipta suatu efektivitas yang baik.

c. Ukuran Ketelitian Yang Menunjukan Apakah Jasa Yang Diberikan Akurat Atau Tidak

Menurut Hartono 2013:10) menyatakan bahwa: “Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan”

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ukuran ketelitian dapat berupa teliti terhadap pemberian informasi yang akurat dan tidak salah sasaran. Selanjutnya Leod (Susanto, 2010:40) menyatakan: “Suatu informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya”

Dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian tugas akan dikatakan efektif dan berkualitas apabila memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga penyelesaian tugas akan lebih akurat.

d. Ukuran Nilai-nilai Sosial Budaya

Menurut Elizabeth (Wursanto, 2011:45) menyatakan bahwa: “Nilai-nilai sosial tidak diperoleh begitu saja saat ia lahir, namun dengan sistem nilai yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya dengan penyesuaian sana-sini”

Selanjutnya menurut Tasmuji dkk (2011:151) mengatakan bahwa: “Budaya atau Kepudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan diinginkan”

Maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai sosial yang didapat seseorang akan berbeda-beda dan budaya sebagai suatu cara menjalani kehidupan menjadikan setiap orang berbeda-beda, maka pada penyelesaian tugas setiap pegawai akan memiliki cara yang berbeda-beda namun harus selalu mengandung nilai sosial budaya.

H. Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Kerja Pegawai

Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, merupakan suatu langkah pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus. Dalam implementasinya Keputusan Bupati tersebut akan memberikan dampak secara menyeluruh pada setiap aspek kehidupan masyarakat ataupun organisasi.

Organisasi baik swasta ataupun organisasi pemerintahan harus mematuhi segala keputusan yang ada, keputusan bupati tersebut yaitu:

1. Perjalanan : a. Mobilitas: Pembatasan dalam Provinsi
2. Kesehatan : a. Rumah Sakit: Sebagian poliklinik rawat jalan dibuka, rawat inap normal
b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama: Kapasitas layanan pasien 75%
3. Jasa : a. Perkantoran dan Perbankan: 25% pegawai WFH dengan jadwal piket
b. Hotel: Hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar
c. Perbankan: Pembatasan jam operasional (08.00-14.00) dan melayani transaksi online
d. Perbankan: Pembatasan pengunjung 50%
e. Lokasi Wisata: Kunjungan individual bukan rombongan
4. Manufaktur : a. Industri: Beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/ atau pengaturan shift
b. Industri: Jumlah pekerja yang masuk tidak lebih dari 75% dari kapasitas gedung
5. Perdagangan: a. Warung Makan/Restoran/Cafe, Mall, Supermarket bahan makanan pokok dan mini market dan pasar rakyat : Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas, dengan mengutamakan layanan pesan antar
b. Mall: Dibuka terbatas
c. Supermarket bahan makanan pokok dan mini market: Pembatasan jam operasional (09.00-18.00)
d. Pasar rakyat: Pembatasan jam operasional (05.00-18.00)

6. Pendidikan : a. Sekolah: Ditutup dan melaksanakan pembelajaran online
7. Area Publik : a. Taman: Pembatasan jam operasional (06.00-09.00 dan 15.00-18.00)
- b. Taman, Terminal dan Tempat Ibadah (Masjid, Gereja, Wihara, Pura, Kelenteng): Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas
- c. Terminal: Pembatasan jam operasional (05.00-19.00)
- d. Perpustakaan, Salon, Spa Barbershop: Ditutup
- e. Penyelenggaraan acara hiburan dan olah raga berkelompok: mendapatkan izin dari pihak berwenang disertai kesiapan protokol kesehatan.

Dalam penerapan atau implementasinya suatu organisasi harus memiliki tingkat adaptasi yang tinggi agar dapat tetap menjalankan organisasi dengan benar-benar baik. Tingkat adaptasi pegawai pada suatu organisasi akan menjadi suatu ukuran dalam pencapaian tingkat efektivitas yang tinggi, seperti pada pendapat Duncan (Steers, 2015:53) yang mengatakan bahwa terdapat tiga ukuran efektivitas, yaitu:

- a. Pencapaian Tujuan
- b. Integrasi
- c. Adaptasi

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui apabila tingkat adaptasi pegawai terhadap Implementasi kebijakan publik rendah maka akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai sehingga akan sangat berpengaruh terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya.

Maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa antara Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 dengan Efektivitas Kerja Pegawai merupakan saling berhubungan atau memiliki hubungan yang saling mempengaruhi.

I. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020

Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 merupakan salah satu keputusan yang di berlakukan oleh bupati sumedang yang berisi tentang pemberlakuan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka penanganan *corona virus disease* 2019.

Keputusan Bupati Tersebut berisi tentang aktivitas-aktivitas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan termasuk batasan-batasannya, untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan batasan-batasan aktivitas yang terlampir dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 tersebut, yaitu:

1. Perjalanan : b. Mobilitas: Pembatasan dalam Provinsi
2. Kesehatan : c. Rumah Sakit: Sebagian poliklinik rawat jalan dibuka, rawat inap normal
d. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama: Kapasitas layanan pasien 75%
3. Jasa : f. Perkantoran dan Perbankan: 25% pegawai WFH dengan jadwal piket
g. Hotel: Hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar
h. Perbankan: Pembatasan jam operasional (08.00-14.00) dan melayani transaksi online
i. Perbankan: Pembatasan pengunjung 50%
j. Lokasi Wisata: Kunjungan individual bukan rombongan
4. Manufaktur : c. Industri: Beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/ atau pengaturan shift
d. Industri: Jumlah pekerja yang masuk tidak lebih dari 75% dari kapasitas gedung
5. Perdagangan: e. Warung Makan/Restoran/Cafe, Mall, Supermarket bahan makanan pokok dan mini market dan pasar rakyat : Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas, dengan mengutamakan layanan pesan antar
f. Mall: Dibuka terbatas
g. Supermarket bahan makanan pokok dan mini market: Pembatasan jam operasional (09.00-18.00)
h. Pasar rakyat: Pembatasan jam operasional (05.00-18.00)

6. Pendidikan : b. Sekolah: Ditutup dan melaksanakan pembelajaran online
7. Area Publik : f. Taman: Pembatasan jam operasional (06.00-09.00 dan 15.00-18.00)
 - g. Taman, Terminal dan Tempat Ibadah (Masjid, Gereja, Wihara, Pura, Kelenteng): Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas
 - h. Terminal: Pembatasan jam operasional (05.00-19.00)
 - i. Perpustakaan, Salon, Spa Barbershop: Ditutup
 - j. Penyelenggaraan acara hiburan dan olah raga berkelompok: mendapatkan izin dari pihak berwenang disertai kesiapan protokol kesehatan.

Dengan diberlakukannya Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 tersebut pemerintah Kabupaten Sumedang berharap dapat diikuti sedemikian rupa oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, guna membantu penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang.

J. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini merupakan suatu gambaran akan penelitian yang berjudul Pengaruh Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang. Kajian penelitian terdahulu ini juga bermaksud untuk memberikan gambaran terhadap beberapa perbedaan dan persamaan yang ada pada setiap hasil penelitian. Berikut ini merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian mengenai Pengaruh Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Pengaruh Koordinasi Tim Pengendalian Kegiatan Terhadap Efektivitas Sistem Pelaporan Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumedang. (Nana Surjana, 2004) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang	1. Menggunakan variabel Efektivitas 2. Metode penelitian kuantitatif	1. Variabel bebas Koordinasi 2. Objek penelitian di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	1. Koordinasi sebesar 56% 2. Efektivitas sebesar 59% 3. Koefisiensi Korelasi sebesar 0,78 4. Koefisien Determinasi sebesar 61% Sisanya sebesar 39% dipengaruhi oleh faktor lain.
2.	Pengaruh Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut Nomor 511/Kep.528.Admrek/2015 terhadap Efektivitas Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota. (Diki Suherman 2017) UIN Sunan Gunung Djati Bandung	1. Variabel terikat Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati 2. Variabel bebas Efektivitas 3. Metode Penelitian Kuantitatif	1. Variabel terikat Keputusan Bupati Garut Nomor 511/Kep.528.Admrek/2015 2. Objek penelitian Kecamatan Garut Kota	1. Fhitung 92,2 dengan tingkat signifikan 0,00 artinya terdapat pengaruh yang signifikan 2. R Square 85,6% sisanya 14,4% dipengaruhi oleh faktor lain.
3.	Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Efektivitas Pencapaian Tujuan di Dinas Arsip dan Perpustakaan	1. Menggunakan variabel Efektivitas 2. Metode penelitian kuantitatif	1. Variabel terikat Komunikasi Interpersonal 2. Objek penelitian Dinas Arsip	1. Komunikasi Interpersonal Cukup Baik sebesar 64,94%

	Kabupaten Sumedang. (Teti Yuningsih 2020) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang		dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.	2. Efektivitas Cukup Baik Sebesar 66,21% 3. Terdapat hubungan yang kuat antara pemberian perintah dengan efisiensi sebesar 0,43 dalam kriteria sedang. 4. Terdapat pengaruh antara Komunikas i Interperson al terhadap Efektivitas sebesar 18,49%
--	---	--	---	--

Berdasarkan tabel diatas maka disimpulkan bahwa terdapat penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai gambaran dari penelitian sedang dilakukan oleh peneliti. Pada tabel di atas dapat diketahui terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

K. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir pada kajian penelitian ini berdasar kebijakan publik kebijakan publik merupakan suatu tindakan-tindakan yang disusun oleh pemerintah guna menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan kerangka berpikir dari adanya Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020, yang merupakan suatu penanganan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Selanjutnya terdapat dimensi menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:86-87) yaitu sebagai berikut :

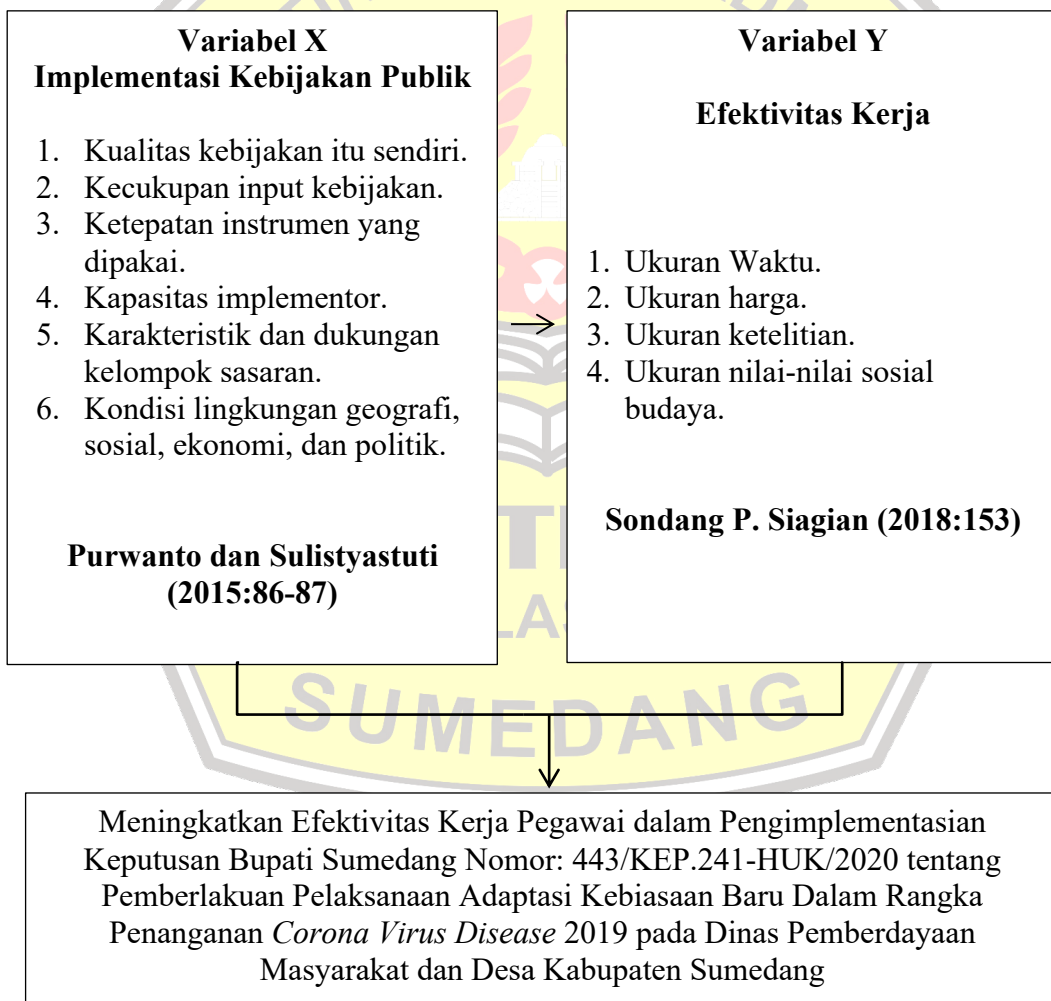
1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 tentunya berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan termasuk kegiatan organisasi, adanya Implementasi Keputusan Bupati tersebut berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. Dimana pegawai akan beradaptasi terhadap keadaan baru dan menghambat pengerjaan tugas. Terdapat beberapa dimensi dari Sondang P. Siagian (2018:153)

1. Ukuran Waktu
2. Ukuran harga
3. Ukuran ketelitian

4. Ukuran nilai-nilai sosial budaya

Dimensi-dimensi di atas selanjutnya akan dijadikan suatu ukuran untuk mengetahui keadaan implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 dan efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang. Sehingga selanjutnya peneliti merumuskan suatu kerangka pemikiran dengan implementasi kebijakan publik sebagai variabel bebas dan efektivitas kerja pegawai sebagai variabel terikat pada penelitian ini, dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran

2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penyusun merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang baik
2. Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang baik.
3. Terdapat hubungan Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241 dengan Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
4. Terdapat pengaruh Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241 terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

Adapun rumusan hipotesis statistik adalah sebagai berikut :

1. $H_0 : p < 75\%$ Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang kurang dari 75% dari yang diharapkan.

$H_a : p \geq 75\%$ Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang lebih dari atau sama dengan 75% dari yang diharapkan.

2. $H_0 : p < 75\%$ Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang kurang dari 75% dari yang diharapkan.

Ha : $p \geq 75\%$ Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedag lebih dari atau sama dengan 75% dari yang diharapkan.

3. Ho : $r_{xy}=0$ Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241 dengan Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

Ha : $r_{xy} \neq 0$ Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241 dengan Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

4. Ho : $r_{xy}=0$ Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241 terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

Ha : $r_{xy} \neq 0$ Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241 terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sumedang.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pada umumnya metode penelitian yaitu suatu cara mendapatkan data secara ilmiah yang digunakan untuk hal tertentu saja, seperti pendapat para ahli di bawah ini:

Sugiyono (2014:2) mengemukakan metode penelitian sebagai berikut :

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Selanjutnya masalah yang akan diteliti yaitu pengaruh Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, maka penelitian yang akan digunakan yaitu dengan metode deskriptif analisis, karena data yang akan diuji yaitu data yang diambil dari sejumlah sampel untuk mewakili populasi. Hal ini agar ditemukan kejadian-kejadian relative antara variabel-variabel, adapun pengertian deskriptif analisis menurut pendapat Sugiyono (2014:112) yaitu:

Deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung melalui proses pengumpulan, penyusunan dan penjelasan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis dengan teori yang ada.

Berdasarkan pada pendapat di atas maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah dalam mengumpulkan data yang selanjutnya akan digunakan pada suatu hal tertentu, dan yang dimaksud dengan deskriptif analisis yaitu suatu gambaran terhadap objek penelitian yang selanjutnya diteliti keadaanya dengan pengumpulan data penyusunan dan analisis-analisis.

B. Definisi Operasional dan Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan diukur terdiri dari satu variabel bebas dengan notasi X dan satu variabel terikat dengan notasi Y. Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas yaitu Implementasi Kebijakan Publik merupakan suatu penerapan atau pelaksanaan dari suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang yang mengatur tentang pemberlakuan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka penanganan *corona virus disease* 2019. Dimensi-dimensi yang diukur yaitu menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:86-87): Kualitas kebijakan itu sendiri, Kecukupan input kebijakan, Ketepatan instrumen yang dipakai, Kapasitas implementor, Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Dari definisi operasional variabel yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Operasional Variabel Implementasi Kebijakan Publik

Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator	No Item
Implementasi Kebijakan Publik (X) Purwanto dan Sulistyastuti (2015:86-87)	1. Kualitas kebijakan itu sendiri.	a. Kejelasan tujuan kebijakan	1
		b. Kejelasan penanggung jawab implementasi	2
	2. Kecukupan input kebijakan.	a. Anggaran implementasi kebijakan	3-4
		b. Dorongan pengimplementasian kebijakan	5-6
	3. Ketepatan instrumen yang dipakai.	a. Pemenuhan alat penunjang implementasi kebijakan	7-8
		b. Pemeliharaan alat penunjang implementasi kebijakan	9-10
	4. Kapasitas implementor.	a. Sumber daya manusia yang mendukung	11-12
		b. Pengawasan yang rutin	13-14
	5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran.	a. Partisipasi pegawai terhadap implementasi kebijakan	15
		b. Kepatuhan pegawai terhadap implementasi kebijakan	16
	6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik.	a. Budaya organisasi terhadap suatu kebijakan baru	17-18
		b. Kondusifitas penyelesaian pekerjaan	19-20

2. Variabel Terikat yaitu Efektivitas Kerja Pegawai (Y) merupakan suatu ukuran apakah organisasi telah berjalan dengan baik atau tidak dalam mencapai tujuannya. Dimensi-dimensi yang diukur yaitu berdasarkan pendapat Sondang P. Siagian (2018:153) yaitu Ukuran Waktu, Ukuran harga, Ukuran ketelitian , Ukuran nilai-nilai sosial budaya. Dari definisi operasional variabel yang telah

dikemukakan di atas, maka selanjutnya operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Operasional Variabel Efektivitas Kerja Pegawai

Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator	No Item
Efektivitas kerja pegawai (Sondang P. Siagian, 2018:153)	1. Ukuran waktu	a. Penyelesaian pekerjaan tepat waktu	1-2
		b. Pemberian waktu penyelesaian tugas yang tepat	3-4
	2. Ukuran harga	a. Terealisasinya rencana kerja sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.	5-6
		b. Ketepatan penyusunan dana	7-9
	3. Ukuran ketelitian	a. Ketepatan pemberian tugas.	10-11
		b. Mengkaji kembali hasil kerja bersama dengan seluruh pegawai, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyelesaian tugas	12-14
	4. Ukuran nilai-nilai sosial budaya	a. Hasil kerja yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.	15-17
		b. Adanya wujud partisipasi masyarakat berupa evaluasi bersama terhadap hasil kerja.	18-20

C. Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah suatu objek atau subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu saja, hal tersebut sejalan dengan pendapat Sugiyono (2014:57) yang menyatakan bahwa:

“Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan”.

Sedangkan menurut Arikunto (2010:173) mengatakan bahwa:

“Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi kasus”.

Jumlah populasi di Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Sumedang adalah sebanyak 46 . dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Populasi Penelitian

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Sekretariat	15
2.	Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	8
3.	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	8
4.	Bidang Pemerintahan Desa	6
5.	Bidang Keuangan dan Aset Desa	9
JUMLAH		46

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2021)

2. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2014:60), menyatakan bahwa:

“Teknik sampling sangatlah diperlukan dalam sebuah penelitian karena hal ini digunakan untuk siapa saja anggota dari populasi yang hendak dijadikan sampel”. Dengan demikian teknik sampling haruslah digambarkan dengan sangat jelas.

Adapun teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling jenuh, hal ini sesuai dengan pendapat menurut Sugiyono (2014:62), yang menyatakan bahwa:

“Sampling jenuh adalah penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik sampel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel X dan variabel Y pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang adalah teknik sampel jenuh karena jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Sumedang berjumlah 46 orang dan seluruhnya dijadikan sebagai sampel penelitian.

3. Sampel Penelitian

Berdasarkan pada pendapat Arikunto (2010:134-185) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis memutuskan untuk menjadikan seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Sumedang sebagai sampel penelitian yang berjumlah 46 orang, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.4
Sampel Penelitian

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Sekretariat	15
2.	Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	8
3.	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	8
4.	Bidang Pemerintahan Desa	6
5.	Bidang Keuangan dan Aset Desa	9
JUMLAH		46

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2021)

D. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data, peneliti melakukan teknik pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2014:137-142) berikut ini merupakan teknik pengumpulan data:

1. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan bahan mengenai variabel-variabel yang diteliti yaitu tentang Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 dan Efektivitas Kerja Pegawai dari buku atau literatur yang mendukung dan membahas mengenai variabel yang diteliti.
2. Studi di lapangan meliputi :
 - a. Observasi, yaitu peneliti mengamati langsung indikator-indikator masalah yang muncul di lapangan.
 - b. Wawancara, mengajukan pertanyaan lisan.
 - c. Angket, merupakan sebagian alat pengumpulan data berupa daftar isian yaitu diberikan kepada responden untuk diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Angket Tertutup. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert* yang mengurutkan nilai skor dari yang terendah sampai yang tertinggi.

Tabel 3.5
Bobot Nilai

Alternatif Jawaban	Bobot Nilai Pertanyaan
Sangat Baik	5
Baik	4
Cukup	3

Kurang Baik	2
Tidak Baik	1

Sumber: Sugiyono, 2014:107

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Menurut Hasan (2013:24) “Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu”. Prinsip penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data setelah data terkumpul selanjutnya data diolah seperti menurut Hasan (2013:24) dapat berupa :

1. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah terkumpul, bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan pada pencatatan di lapangan.
2. *Coding*, (Pengkodean), yaitu pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama.
3. Pemberian skor atau nilai, yaitu dalam pemberian skor digunakan skala *Likert* yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor. Kriteria penilaian ini digolongkan dalam empat tingkatan dengan penilaian sebagai berikut :
 - a. Jawaban SS, diberi skor 5
 - b. Jawaban S, diberi skor 4
 - c. Jawaban KS, diberi skor 3
 - d. Jawaban TS, diberi skor 2
 - e. Jawaban STS, diberi skor 1
4. *Tabulasi*, yaitu pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisi yang dibutuhkan.

Dalam pengolahan data ini, peneliti menggunakan aplikasi SPSS untuk mendapatkan hasil yang tepat dan jelas.

a. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas merupakan suatu alat ukur yang memungkinkan peneliti beranggapan bahwa alat ukur itu dapat digunakan untuk mengukur karakter

yang hendak diukurnya. Menurut Iskandar (2014:147): “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keakuratan suatu alat ukur”.

Suatu alat ukur dikatakan valid jika alat ukur itu menghasilkan ukuran yang tepat dalam suatu pengukuran masalah tertentu, dan tidak valid untuk pengukuran masalah yang lain. Alat ukur yang valid dan akurat mempunyai validitas tinggi, sebaliknya alat ukur yang tidak valid memiliki validitas yang rendah.

Untuk memberikan hasil analisis tiap item, maka digunakan analisis item menurut Masrun (Sugiyono, 2014:106) yang menyebutkan bahwa item yang mempunyai nilai positif dan dinyatakan valid harus mempunyai nilai minimal 0,3 atau lebih dari 0,3 ($\geq 0,3$), maka butir instrumen tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, dan apabila koefesien korelasi antara skor item dengan total skor kurang dari 0,3 maka instrument tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus koefesien *product moment*, sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Nilai validitas

x = Skor tiap item

y = Skor total

n = Jumlah sampel

Σ = Jumlah

Setelah data dari penyebaran angket tentang Implementasi Kebijakan Publik terkumpul maka selanjutnya dilakukan tabulasi seperti pada tabel berikut ini :



Tabel 3.6
Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Implementasi Kebijakan Publik

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
2	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	77
3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	76
4	4	5	3	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	89
5	5	3	3	3	4	3	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	84
6	5	4	4	4	5	4	5	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	87
7	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	72
8	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	3	4	85
9	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	73
10	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	89
11	5	3	3	3	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	82
12	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	79
14	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	75
15	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
16	5	3	5	3	4	3	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	86
17	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	88
18	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	68
19	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	3	4	86
20	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	71
21	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	5	5	3	4	3	5	3	4	4	76
22	5	3	4	3	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	83
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
24	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	74
25	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	77
26	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	90
27	3	3	4	3	4	3	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	83
28	5	4	3	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	88
29	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	72
30	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	3	4	86
31	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	72

32	5	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	88
33	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	85
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
35	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	77
36	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	76
37	4	5	4	5	4	5	4	4	4	3	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	88
38	5	3	5	3	4	3	4	4	4	3	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	83
39	5	3	5	3	5	4	5	5	3	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	86
40	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	70
41	3	3	3	3	3	3	5	5	4	3	4	3	4	3	4	4	5	4	3	4	73
42	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	73
43	5	4	5	4	3	4	4	4	3	3	5	3	5	5	4	5	5	5	5	4	85
44	5	4	5	4	3	4	5	5	5	3	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	82
45	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	69
46	3	3	3	3	3	3	5	5	4	3	4	3	4	3	4	4	5	4	3	4	73
Total	190	170	175	167	178	175	183	178	183	186	188	179	190	189	187	183	198	184	183	190	3656

Setelah dilakukan rekaptulasi, selanjutnya menggunakan aplikasi SPSS dilakukan perhitungan Validitas sehingga didapat hasil sebagai berikut:



Tabel 3.7
Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi Kebijakan

		Correlations																				
		X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	T
X01	Pearson Correlation	1	0,233	,331 ⁺	0,198	,498 ⁺	,378 ⁺	,558 ⁺	,450 ⁺	,403 ⁺	,482 ⁺	,314 ⁺	,529 ⁺	0,158	,587 ⁺	0,045	,539 ⁺	,492 ⁺	,470 ⁺	,403 ⁺	0,158	,764 ⁺
	Sig. (2-tailed)		0,119	0,025	0,188	0,000	0,010	0,000	0,002	0,008	0,001	0,034	0,000	0,294	0,000	0,788	0,000	0,001	0,001	0,008	0,294	0,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X02	Pearson Correlation	0,233	1	0,016	,791 ⁺	0,071	,849 ⁺	0,082	0,009	0,110	0,077	0,078	0,128	,547 ⁺	0,214	0,088	,808 ⁺	-0,047	0,208	0,241	0,171	,449 ⁺
	Sig. (2-tailed)	0,119		0,917	0,000	0,838	0,000	0,587	0,954	0,485	0,812	0,808	0,403	0,000	0,154	0,580	0,000	0,757	0,170	0,107	0,255	0,002
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X03	Pearson Correlation	,331 ⁺	0,016	1	-0,019	0,048	0,082	0,178	0,138	0,112	0,083	0,230	0,198	0,105	0,225	-0,038	0,121	0,188	0,098	,299 ⁺	0,195	,323 ⁺
	Sig. (2-tailed)	0,025	0,917		0,899	0,752	0,588	0,241	0,389	0,458	0,875	0,124	0,192	0,488	0,133	0,801	0,425	0,269	0,518	0,044	0,194	0,029
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X04	Pearson Correlation	0,198	,791 ⁺	-0,019	1	0,105	,850 ⁺	0,124	0,087	0,103	0,081	0,215	0,057	,384 ⁺	,314 ⁺	0,010	,518 ⁺	-0,174	0,100	0,103	0,111	,406 ⁺
	Sig. (2-tailed)	0,188	0,000	0,899		0,487	0,000	0,412	0,568	0,498	0,595	0,151	0,707	0,008	0,034	0,948	0,000	0,247	0,509	0,498	0,483	0,005
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X05	Pearson Correlation	,498 ⁺	0,071	0,048	0,105	1	0,187	,319 ⁺	0,154	,386 ⁺	,851 ⁺	,458 ⁺	,553 ⁺	0,160	,481 ⁺	0,221	0,259	,415 ⁺	,394 ⁺	,428 ⁺	0,160	,632 ⁺
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,838	0,752	0,487		0,213	0,031	0,308	0,012	0,000	0,001	0,000	0,288	0,001	0,140	0,082	0,004	0,007	0,003	0,288	0,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X06	Pearson Correlation	,378 ⁺	,849 ⁺	0,082	,850 ⁺	0,187	1	0,201	0,155	0,199	0,228	0,054	0,188	,529 ⁺	0,153	0,082	,872 ⁺	-0,087	0,224	,341 ⁺	0,120	,522 ⁺
	Sig. (2-tailed)	0,010	0,000	0,588	0,000	0,213		0,180	0,305	0,185	0,127	0,720	0,285	0,000	0,309	0,883	0,000	0,584	0,134	0,020	0,427	0,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X07	Pearson Correlation	,558 ⁺	0,082	0,178	0,124	,319 ⁺	0,201	1	,877 ⁺	,596 ⁺	,512 ⁺	0,248	,385 ⁺	0,081	,385 ⁺	0,005	,319 ⁺	,549 ⁺	0,157	0,098	0,081	,657 ⁺
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,587	0,241	0,412	0,031	0,180		0,000	0,000	0,000	0,097	0,008	0,593	0,013	0,975	0,030	0,000	0,297	0,515	0,593	0,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X08	Pearson Correlation	,450 ⁺	0,009	0,138	0,087	0,154	0,155	,877 ⁺	1	,456 ⁺	,387 ⁺	0,278	,338 ⁺	0,132	0,288	0,030	,324 ⁺	,443 ⁺	0,183	-0,007	0,132	,565 ⁺
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,954	0,389	0,588	0,308	0,305	0,000		0,001	0,008	0,081	0,022	0,381	0,054	0,844	0,028	0,002	0,280	0,985	0,381	0,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X09	Pearson Correlation	,403 ⁺	0,110	0,112	0,103	,386 ⁺	0,199	,596 ⁺	,456 ⁺	1	,491 ⁺	0,202	,308 ⁺	0,013	0,102	0,008	0,142	0,150	0,000	0,199	0,109	,487 ⁺
	Sig. (2-tailed)	0,008	0,465	0,458	0,498	0,012	0,185	0,000	0,001		0,001	0,179	0,037	0,934	0,499	0,988	0,347	0,319	1,000	0,185	0,472	0,001
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X10	Pearson Correlation	,482 ⁺	0,077	0,083	0,081	,851 ⁺	0,228	,512 ⁺	,387 ⁺	,491 ⁺	1	,327 ⁺	,821 ⁺	0,052	,418 ⁺	,498 ⁺	0,180	,353 ⁺	0,077	0,100	0,283	,644 ⁺
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,812	0,875	0,595	0,000	0,127	0,000	0,008	0,001		0,027	0,000	0,731	0,004	0,000	0,288	0,018	0,810	0,509	0,077	0,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

X11	Pearson Correlation	.314*	0.078	0.230	0.215	.458**	0.054	0.248	0.278	0.202	.327*	1	.482**	.515*	.548*	.556**	.587**	.388*	.516**	0.202	.704*	.659*
	Sig. (2-tailed)	0.034	0.608	0.124	0.151	0.001	0.720	0.097	0.061	0.179	0.027		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	0.179	0.000	0.000
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
X12	Pearson Correlation	.529**	0.126	0.198	0.057	.553**	0.168	.385*	.336*	.308*	.621**	.482**	1	0.275	.438*	.413**	.331*	.587**	0.165	-0.006	.425*	.676**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.403	0.192	0.707	0.000	0.265	0.008	0.022	0.037	0.000	0.001		0.064	0.002	0.004	0.025	0.000	0.273	0.970	0.003	0.000
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
X13	Pearson Correlation	0.158	.547**	0.105	.384**	0.160	.529**	0.081	0.132	0.013	0.052	.515**	0.275	1	.373*	.372*	.633**	.298*	.456**	.301*	.446*	.538*
	Sig. (2-tailed)	0.294	0.000	0.488	0.008	0.288	0.000	0.593	0.381	0.934	0.731	0.000	0.064		0.011	0.011	0.000	0.044	0.001	0.042	0.002	0.000
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
X14	Pearson Correlation	.587**	0.214	0.225	.314*	.481**	0.153	.385*	0.288	0.102	.418*	.548**	.438**	.373*	1	.408**	.422*	.542*	.383**	.344*	.513*	.725**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.154	0.133	0.034	0.001	0.309	0.013	0.054	0.499	0.004	0.000	0.002	0.011		0.005	0.003	0.000	0.009	0.019	0.000	0.000
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
X15	Pearson Correlation	0.045	0.088	-0.038	0.010	0.221	0.062	0.005	0.030	0.008	.498*	.556**	.413**	.372*	.408*	1	.326*	.298*	0.157	0.006	.800*	.417*
	Sig. (2-tailed)	0.768	0.560	0.801	0.946	0.140	0.683	0.975	0.844	0.968	0.000	0.000	0.004	0.011	0.005		0.027	0.044	0.299	0.966	0.000	0.004
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
X16	Pearson Correlation	.539**	.608**	0.121	.518**	0.259	.672**	.319*	.324*	0.142	0.160	.567**	.331*	.633**	.422*	.326*	1	.301*	.680**	0.285	.427*	.720**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.425	0.000	0.082	0.000	0.030	0.028	0.347	0.288	0.000	0.025	0.000	0.003	0.027		0.042	0.000	0.055	0.003	0.000
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
X17	Pearson Correlation	.492**	-0.047	0.166	-0.174	.415**	-0.087	.549*	.443**	0.150	.353*	.368*	.587**	.298*	.542*	.298*	.301*	1	.412**	0.215	.298*	.599**
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.757	0.269	0.247	0.004	0.584	0.000	0.002	0.319	0.016	0.012	0.000	0.044	0.000	0.044	0.042		0.004	0.151	0.044	0.000
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
X18	Pearson Correlation	.470**	0.206	0.098	0.100	.394**	0.224	0.157	0.163	0.000	0.077	.516**	0.165	.456*	.383*	0.157	.680**	.412*	1	.316*	0.152	.501*
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.170	0.516	0.509	0.007	0.134	0.297	0.280	1.000	0.610	0.000	0.273	0.001	0.009	0.299	0.000	0.004		0.032	0.313	0.000
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
X19	Pearson Correlation	.403*	0.241	.299*	0.103	.428**	.341*	0.098	-0.007	0.199	0.100	0.202	-0.006	.301*	.344*	0.006	0.285	0.215	.316*	1	0.205	.431*
	Sig. (2-tailed)	0.006	0.107	0.044	0.496	0.003	0.020	0.515	0.965	0.185	0.509	0.179	0.970	0.042	0.019	0.966	0.055	0.151	0.032		0.172	0.003
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
X20	Pearson Correlation	0.158	0.171	0.195	0.111	0.160	0.120	0.081	0.132	0.109	0.263	.704**	.425**	.446*	.513*	.800**	.427*	.298*	0.152	0.205	1	.522*
	Sig. (2-tailed)	0.294	0.255	0.194	0.463	0.288	0.427	0.593	0.381	0.472	0.077	0.000	0.003	0.002	0.000	0.000	0.003	0.044	0.313	0.172		0.000
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
T	Pearson Correlation	.764**	.449*	.323*	.406*	.632**	.522**	.657**	.565**	.487**	.644**	.659**	.676**	.538*	.725**	.417**	.720**	.599**	.501**	.431**	.522**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.002	0.029	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Untuk mengetahui bahwa instrumen itu valid maka nilai hitung r selanjutnya di interpretasikan ke dalam kriteria pengujian instrument, dimana jika r hitung lebih besar atau sama dengan kriteria pengujian yang ditetapkan (r hitung $\geq 0,3$) maka item tersebut dinyatakan valid dengan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut :

H_a : $r_{hitung} \geq r_{kritis}$, H_0 ditolak dan H_a diterima dikatakan valid apabila $r_{hitung} \geq 0,3$.

H_0 : $r_{hitung} \geq r_{kritis}$, H_0 ditolak dan H_a diterima dikatakan tidak valid apabila $r_{hitung} \leq 0,3$.

Sehingga dapat dilihat dari tabel di atas bahwa item 1 memiliki r_{hitung} sebesar 0,764 dengan r_{kritis} sebesar 0,3 maka dapat diketahui bahwa $r_{hitung} \geq r_{kritis}$ sehingga instrumen item 1 dinyatakan “Valid”. Selanjutnya hal tersebut dilakukan pada seluruh Instrumen penelitian sehingga dapat diketahui bahwa seluruh instrumen penelitian dengan jumlah 20 item dinyatakan Valid dan dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.

Selanjutnya untuk mengetahui validitas pada Variabel Efektivitas Kerja Pegawai, maka dilakukan hal yang sama dengan menyusun tabulasi jawaban angket terlebih dahulu, sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Efektivitas Kerja Pegawai

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	78
3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	77
4	5	4	5	5	3	5	4	5	4	5	4	5	3	3	3	3	5	5	4	3	83
5	5	4	5	4	3	5	5	4	5	5	5	4	3	3	3	4	5	4	5	3	84
6	5	5	4	5	3	4	5	5	5	4	4	5	3	4	3	3	5	4	5	3	84
7	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	62
8	5	4	4	3	3	5	3	5	3	5	3	5	4	4	4	4	3	4	5	4	80
9	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	70
10	5	4	3	3	3	3	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	3	5	4	5	83
11	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	72
12	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	73
13	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	73
14	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	76
15	5	4	3	5	3	3	4	5	4	5	3	5	3	4	3	3	3	5	4	5	79
16	5	4	5	3	3	5	5	4	5	5	3	4	3	5	3	4	3	4	5	4	82
17	5	5	3	5	3	3	5	5	5	4	3	5	3	4	5	5	3	4	5	4	84
18	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	62
19	5	4	3	3	5	5	3	5	3	5	3	5	4	4	4	4	5	4	5	3	82
20	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	68
21	5	4	3	3	5	3	4	4	4	5	3	5	5	5	3	4	4	5	4	3	81
22	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	71
23	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	73
24	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	77
25	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	74
26	5	4	3	3	5	3	4	5	4	3	4	5	3	4	3	5	3	5	4	5	80
27	5	4	5	4	5	3	5	4	5	5	3	4	3	5	5	4	3	4	5	4	85
28	5	5	4	3	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	90
29	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	62
30	3	4	3	3	5	5	3	5	3	3	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	78
31	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	69
32	5	4	4	3	5	3	4	4	4	5	3	4	5	5	5	3	4	5	4	5	84
33	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	70
34	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	77

35	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	76
36	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	76
37	3	4	5	5	3	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	89
38	5	4	3	4	5	5	5	4	5	3	5	4	5	5	5	4	3	4	5	4	87
39	3	5	4	5	3	4	5	5	5	3	3	5	5	4	5	5	5	4	5	4	87
40	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	62
41	3	4	3	3	3	5	3	5	3	5	3	3	4	4	3	4	5	4	5	4	76
42	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	71
43	3	4	3	5	5	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	4	4	5	4	5	83
44	3	4	4	4	3	4	4	4	4	5	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	74
45	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	77
46	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	76
Total	184	184	163	165	165	173	188	192	184	179	159	181	168	175	176	174	172	192	192	171	3537

Setelah dilakukan rekapitulasi, selanjutnya menggunakan aplikasi SPSS dilakukan perhitungan Validitas sehingga didapat hasil sebagai berikut:



Tabel 3.9
Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Kerja Pegawai

		Correlations																					
		Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	Y06	Y07	Y08	Y09	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y20	T	
Y01	Pearson Correlation	1	,387 ^{**}	0,276	0,073	0,203	0,071	,321 [*]	,382 ^{**}	,456 ^{**}	,449 ^{**}	0,186	,650 ^{**}	0,036	,396 ^{**}	0,037	0,251	-0,035	0,284	,334 [*]	0,119	,549 ^{**}	
	Sig. (2-tailed)		0,008	0,063	0,631	0,176	0,639	0,030	0,009	0,001	0,002	0,216	0,000	0,815	0,006	0,808	0,092	0,816	0,056	0,023	0,432	0,000	
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
Y02	Pearson Correlation	,387 ^{**}	1	0,229	,423 ^{**}	0,131	0,207	,414 ^{**}	,740 ^{**}	,707 ^{**}	0,186	0,180	,518 ^{**}	0,275	,307 [*]	,428 ^{**}	,696 ^{**}	,409 ^{**}	0,000	,370 [*]	0,230	,717 ^{**}	
	Sig. (2-tailed)	0,008		0,125	0,003	0,386	0,168	0,004	0,000	0,000	0,215	0,231	0,000	0,064	0,038	0,003	0,000	0,005	1,000	0,011	0,125	0,000	
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
Y03	Pearson Correlation	0,276	0,229	1	,316 [*]	-0,147	,420 ^{**}	,369 ^{**}	0,206	,432 ^{**}	,482 ^{**}	0,252	0,210	-0,013	0,089	0,102	0,189	0,230	0,055	,320 [*]	0,143	,486 ^{**}	
	Sig. (2-tailed)	0,063	0,125		0,033	0,329	0,004	0,012	0,169	0,003	0,001	0,090	0,162	0,933	0,558	0,499	0,209	0,124	0,717	0,030	0,342	0,001	
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
Y04	Pearson Correlation	0,073	,423 ^{**}	,316 [*]	1	-0,142	0,212	,389 ^{**}	,381 ^{**}	,449 ^{**}	0,138	0,237	,366 ^{**}	0,132	0,185	0,229	0,191	0,271	0,256	0,225	,329 [*]	,512 ^{**}	
	Sig. (2-tailed)	0,631	0,003	0,033		0,346	0,157	0,008	0,009	0,002	0,361	0,112	0,012	0,384	0,218	0,126	0,203	0,069	0,086	0,134	0,025	0,000	
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
Y05	Pearson Correlation	0,203	0,131	-0,147	-0,142	1	0,089	-0,019	0,160	0,093	-0,002	0,079	0,068	,374 [*]	,413 ^{**}	,362 [*]	0,177	0,180	0,238	0,160	0,226	,360 [*]	
	Sig. (2-tailed)	0,176	0,388	0,329	0,346		0,558	0,901	0,288	0,540	0,989	0,802	0,652	0,010	0,004	0,013	0,238	0,231	0,111	0,288	0,131	0,014	
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
Y06	Pearson Correlation	0,071	0,207	,420 ^{**}	0,212	0,089	1	-0,117	,454 ^{**}	0,049	,301 [*]	0,199	0,134	0,196	0,078	0,082	0,215	,456 ^{**}	-0,082	,505 ^{**}	0,080	,451 ^{**}	
	Sig. (2-tailed)	0,639	0,168	0,004	0,157	0,558		0,440	0,002	0,748	0,042	0,184	0,375	0,192	0,606	0,588	0,151	0,001	0,586	0,000	0,598	0,002	
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
Y07	Pearson Correlation	,321 [*]	,414 ^{**}	,369 ^{**}	,389 ^{**}	-0,019	-0,117	1	-0,053	,879 ^{**}	-0,029	,311 [*]	0,139	-0,035	0,177	0,218	0,165	-0,054	-0,079	0,253	0,008	,364 [*]	
	Sig. (2-tailed)	0,030	0,004	0,012	0,008	0,901	0,440		0,725	0,000	0,848	0,035	0,358	0,819	0,240	0,145	0,272	0,721	0,600	0,089	0,956	0,013	
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
Y08	Pearson Correlation	,382 ^{**}	,740 ^{**}	0,206	,381 ^{**}	0,160	,454 ^{**}	-0,053	1	0,262	,361 ^{**}	0,090	,631 ^{**}	0,243	0,259	0,232	,604 ^{**}	,509 ^{**}	0,265	,452 ^{**}	,355 [*]	,705 ^{**}	
	Sig. (2-tailed)	0,009	0,000	0,169	0,009	0,288	0,002	0,725		0,079	0,014	0,553	0,000	0,103	0,082	0,121	0,000	0,000	0,075	0,002	0,016	0,000	
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
Y09	Pearson Correlation	,456 ^{**}	,707 ^{**}	,432 ^{**}	,449 ^{**}	0,093	0,049	,879 ^{**}	0,262	1	0,132	,382 ^{**}	,314 [*]	0,097	,325 [*]	,353 [*]	,492 ^{**}	0,096	0,000	0,262	0,162	,622 ^{**}	
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,000	0,003	0,002	0,540	0,748	0,000	0,079		0,383	0,009	0,034	0,520	0,027	0,016	0,001	0,524	1,000	0,079	0,281	0,000	
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
Y10	Pearson Correlation	,449 ^{**}	0,186	,482 ^{**}	0,138	-0,002	,301 [*]	-0,029	,361 ^{**}	0,132	1	0,102	,392 ^{**}	0,111	,306 [*]	0,005	0,170	0,159	,332 [*]	,361 [*]	0,212	,504 ^{**}	
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,215	0,001	0,361	0,989	0,042	0,848	0,014	0,383		0,500	0,007	0,461	0,039	0,976	0,260	0,291	0,024	0,014	0,157	0,000	
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	

Y11	Pearson Correlation	0,188	0,180	0,252	0,237	0,079	0,199	,311	0,090	,382	0,102	1	0,233	0,213	0,172	0,138	0,229	0,220	0,134	0,158	0,107	,422
	Sig. (2-tailed)	0,218	0,231	0,090	0,112	0,802	0,184	0,035	0,553	0,009	0,500		0,119	0,155	0,254	0,387	0,128	0,142	0,378	0,299	0,480	0,003
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y12	Pearson Correlation	,650	,518	0,210	,388	0,068	0,134	0,139	,631	,314	,392	0,233	1	0,283	,473	0,147	,344	0,211	,388	,412	0,279	,668
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,182	0,012	0,852	0,375	0,358	0,000	0,034	0,007	0,119		0,058	0,001	0,330	0,019	0,160	0,012	0,004	0,080	0,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y13	Pearson Correlation	0,038	0,275	-0,013	0,132	,374	0,198	-0,035	0,243	0,097	0,111	0,213	0,283	1	,670	,597	,328	,294	,382	0,243	,483	,566
	Sig. (2-tailed)	0,815	0,064	0,933	0,384	0,010	0,192	0,819	0,103	0,520	0,481	0,155	0,058		0,000	0,000	0,027	0,048	0,013	0,103	0,001	0,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y14	Pearson Correlation	,396	,307	0,089	0,185	,413	0,078	0,177	0,259	,325	,306	0,172	,473	,670	1	,458	,301	-0,015	,385	,429	,585	,662
	Sig. (2-tailed)	0,008	0,038	0,558	0,218	0,004	0,608	0,240	0,082	0,027	0,039	0,254	0,001	0,000		0,001	0,042	0,923	0,008	0,003	0,000	0,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y15	Pearson Correlation	0,037	,428	0,102	0,229	,382	0,082	0,218	0,232	,353	0,005	0,138	0,147	,597	,458	1	,447	0,038	0,109	0,179	,489	,531
	Sig. (2-tailed)	0,808	0,003	0,499	0,128	0,013	0,588	0,145	0,121	0,018	0,978	0,387	0,330	0,000	0,001		0,002	0,815	0,470	0,234	0,001	0,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y16	Pearson Correlation	0,251	,698	0,189	0,191	0,177	0,215	0,185	,604	,492	0,170	0,229	,344	,328	,301	,447	1	0,243	0,057	0,193	,308	,616
	Sig. (2-tailed)	0,092	0,000	0,209	0,203	0,238	0,151	0,272	0,000	0,001	0,280	0,128	0,019	0,027	0,042	0,002		0,104	0,709	0,200	0,039	0,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y17	Pearson Correlation	-0,035	,409	0,230	0,271	0,180	,458	-0,054	,509	0,098	0,159	0,220	0,211	,294	-0,015	0,038	0,243	1	0,082	0,208	-0,058	,426
	Sig. (2-tailed)	0,818	0,005	0,124	0,089	0,231	0,001	0,721	0,000	0,524	0,291	0,142	0,180	0,048	0,923	0,815	0,104		0,590	0,189	0,701	0,003
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y18	Pearson Correlation	0,284	0,000	0,055	0,258	0,238	-0,082	-0,079	0,285	0,000	,332	0,134	,388	,382	,385	0,109	0,057	0,082	1	-0,142	,527	,381
	Sig. (2-tailed)	0,058	1,000	0,717	0,088	0,111	0,588	0,800	0,075	1,000	0,024	0,378	0,012	0,013	0,008	0,470	0,709	0,590		0,348	0,000	0,009
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y19	Pearson Correlation	,334	,370	,320	0,225	0,180	,505	0,253	,452	0,262	,381	0,158	,412	0,243	,429	0,179	0,193	0,208	-0,142	1	0,185	,579
	Sig. (2-tailed)	0,023	0,011	0,030	0,134	0,288	0,000	0,089	0,002	0,079	0,014	0,299	0,004	0,103	0,003	0,234	0,200	0,189	0,348		0,219	0,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y20	Pearson Correlation	0,119	0,230	0,143	,329	0,228	0,080	0,008	,355	0,162	0,212	0,107	0,279	,483	,585	,489	,308	-0,058	,527	0,185	1	,537
	Sig. (2-tailed)	0,432	0,125	0,342	0,025	0,131	0,598	0,958	0,018	0,281	0,157	0,480	0,080	0,001	0,000	0,001	0,039	0,701	0,000	0,219		0,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
T	Pearson Correlation	,549	,717	,488	,512	,380	,451	,384	,705	,822	,504	,422	,688	,588	,682	,531	,618	,428	,381	,579	,537	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,001	0,000	0,014	0,002	0,013	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,009	0,000	0,000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Untuk mengetahui bahwa instrumen itu valid maka nilai hitung r selanjutnya di interpretasikan ke dalam kriteria pengujian instrument, dimana jika r hitung lebih besar atau sama dengan kriteria pengujian yang ditetapkan (r hitung $\geq 0,3$) maka item tersebut dinyatakan valid dengan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut :

H_a : $r_{hitung} \geq r_{kritis}$, H_0 ditolak dan H_a diterima dikatakan valid apabila $r_{hitung} \geq 0,3$.

H_0 : $r_{hitung} \geq r_{kritis}$, H_0 ditolak dan H_a diterima dikatakan tidak valid apabila $r_{hitung} \leq 0,3$.

Sehingga dapat dilihat dari tabel di atas bahwa item 1 memiliki r_{hitung} sebesar 0,549 dengan r_{kritis} sebesar 0,3 maka dapat diketahui bahwa $r_{hitung} \geq r_{kritis}$ sehingga instrumen item 1 dinyatakan “Valid”. Selanjutnya hal tersebut dilakukan pada seluruh Instrumen penelitian sehingga dapat diketahui bahwa seluruh instrumen penelitian dengan jumlah 20 item dinyatakan Valid dan dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.

b. Uji Realibilitas Instrumen

Uji reliabilitas merupakan pengujian instrumen penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut memiliki kestabilan dan konsistensi sehingga bisa digunakan kembali untuk penelitian pada waktu yang berbeda maka hasilnya akan tetap sama.

Menurut Selltiz (Iskandar, 2014:166) Reliabilitas suatu instrumen pengukuran, didefinisikan sebagai suatu kemampuan instrumen guna mengukur secara konsisten terhadap fenomena yang dirancang untuk diukur.

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas instrumen menggunakan teknik analisis *alpha cronbach*. *Alpha Cronbach* dapat digunakan untuk menguji

reliabilitas instrumen *skala likert* (1-5) atau instrumen dengan item-item dalam bentuk esai. Rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut :

Tahap I

$$\sigma_b^2 = \frac{b - \frac{d^2}{r}}{r}$$

Keterangan :

- σ_b^2 = Varian butir
 b = Jumlah kuadrat skor item
 d = Jumlah kuadrat subjek
 r = Jumlah responden

Tahap II

$$\sigma_t^2 = \frac{c - \frac{e^2}{r}}{r}$$

Keterangan :

- σ_t^2 = Varian total
 c = Jumlah total kuadrat
 e = Jumlah total item
 r = Jumlah responden

Tahap III

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

r_{11} = Reliabilitstrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = Total varian butir

σ_t^2 = Total varian

Maka untuk mengetahui bahwa instrument reliable atau tidaknya maka selanjutnya nilai r_{hitung} di interpretasikan kedalam r_{kritis} dimana jika r_{hitung} lebih besar atau sama dengan r_{kritis} ($r_{hitung} \geq 0,6$).

Berikut ini merupakan hasil dari uji reliabilitas pada variabel Implementasi Kebijakan Publik menggunakan SPSS :

Tabel 3.10
Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Variabel Implementasi Kebijakan Publik

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,886	20

Berdasarkan pada tabel hasil uji reliabilitas di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel Implementasi Kebijakan Publik memiliki nilai Reliabilitas sebesar 0,886, Selanjutnya untuk mengetahui bahwa instrument reliable atau tidak, maka nilai r_{hitung} di interpretasikan kedalam r_{kritis} sehingga didapat $0,886 \geq 0,6$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel Implementasi Kebijakan Publik dinyatakan Reliable dan dapat digunakan kembali pada penelitian di waktu yang berbeda karena memiliki kesetabilan dan konsistensi yang baik.

Selanjutnya merupakan hasil dari uji reliabilitas pada variabel Efektivitas Kerja Pegawai menggunakan SPSS :

Tabel 3.11
Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Variabel Efektivitas Kerja Pegawai

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,859	20

Berdasarkan pada tabel hasil uji reliabilitas di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel Efektivitas Kerja Pegawai memiliki nilai Reliabilitas sebesar 0,859, Selanjutnya untuk mengetahui bahwa instrument reliable atau tidak, maka nilai r_{hitung} di interpretasikan kedalam r_{kritis} sehingga didapat $0,859 \geq 0,6$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel Efektivitas Kerja Pegawai dinyatakan Reliable dan dapat digunakan kembali pada penelitian di waktu yang berbeda karena memiliki kesetabilan dan konsistensi yang baik.

2. Teknik Analisis Data

a. Uji Presentase

Untuk mengukur seberapa besar persentase dari persepsi responden terhadap indikator dari masing-masing variabel, maka dilakukan perhitungan presentase dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan skor ideal, yaitu jumlah pertanyaan x jumlah responden x skor tertinggi.
2. Setelah skor ideal diketahui langkah selanjutnya melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{skor total}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan :

Skor total = Jumlah skor hasil dari kuesioner responden

Skor ideal = Jumlah skor tertinggi

b. Uji Normalitas Data

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris. Menurut Sugiyono (2014:199) menyatakan bahwa: “Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel harus berdistribusi normal”. Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test*. Langkah-langkah pengujian normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* antara lain sebagai berikut:

1. Susun frekuensi-frekuensi dari tiap nilai teramati, berurutan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kemudian susun frekuensi kumulatif dari nilai-nilai teramati itu.
2. Hitung nilai frekuensi kumulatif dengan jumlah responden. Dan hasilnya sebagai $S_n(X)$.

3. Hitung selisih Z-Score dan $F(X)$ pada masing-masing nilai teramati.

Dan hasilnya sebagai $F(X)-Z$.

H_0 : Data residual terdistribusi normal, apabila $\text{sig valid} > \alpha = 0,05$

H_a : Data residual tidak terdistribusi normal, apabila $\text{sig valid} < \alpha = 0,05$

c. Uji Koefisien Korelasi

Teknik korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi *Product Moment Pearson*, yaitu dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor yang merupakan jumlah skor tiap butir dari alat ukur tersebut dengan menggunakan rumus Korelasi *Product Moment Pearson* sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Nilai validitas

x = Skor tiap item

y = Skor total

n = Jumlah sampel

$\sum$ = Jumlah

Setelah diperoleh nilai koefisien korelasi r_{xy} kemudian untuk menafsirkan nilai tersebut digunakan cara sebagai berikut ini:

- Membandingkan harga “r” hitung dengan “r” *Product Moment*.
- Menginterpretasikan dengan skala pengukuran menurut Sugiyono (2014:214), seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
1.	0,00 – 0,199	Sangat Rendah
2.	0,20 -0,399	Rendah
3.	0,40 – 0,599	Sedang

4.	0,60 – 0,799	Kuat
5.	0,80 – 1,000	Sangat Kuat

d. Uji Signifikan

Untuk mengetahui apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak maka dalam penelitian ini digunakan uji coba dua pihak yaitu uji sigifikansi korelasi produk momen dengan taraf kesalahan 5% didasarkan pendapat Sugiyono (2014: 150) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Nilai hitung

r = Koefisien korelasi hasil hitung

n = Jumlah responden

Setelah dihitung nilai statistik uji t pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$ dengan rumus statistik uji :

Kaidah keputusan : jika $t_{hitung} < t_{1/2 \alpha, n-2}$ —→ data valid

jika $t_{hitung} > t_{1/2 \alpha, n-2}$ —→ data tidak valid

e. Uji Koefesien Determinasi

Pengujian hipotesis untuk mengetahui drajat ketertarikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan menggunakan rumus koefisien deteminasi menurut Sugiyono (2014 : 151) yaitu :

$$Kd = r^2 \times 100 \%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Harga Koefisien Korelasi yang dikuadratkan

F. Lokasi Dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang berlokasi di Kabupaten Sumedang. Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan mulai dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Juni 2021. Adapun jadwal penelitian ini seperti pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.13
Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan	Tahun 2020								Tahun 2021																											
	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			Juli				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1			
Observasi Awal																																				
Pengajuan Judul																																				
Analisis Kebutuhan Penelitian																																				
Pengumpulan Data																																				
Penyusunan Proposal																																				
Seminar Proposal																																				
Penyusunan Skripsi																																				
Sidang Skripsi																																				

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengujian terhadap hipotesis serta menganalisis Pengaruh Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020, dari hasil pengamatan, penelitian dan pengolahan (analisis) data maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, berdasarkan hasil analisis mencapai nilai sebesar : 79,47% hal ini membuktikan bahwa Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang berada pada kategori **Baik**.
2. Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, berdasarkan hasil analisis mencapai nilai sebesar : 76,89% hal ini membuktikan bahwa Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang berada pada kriteria **Baik**,
3. Hasil pengujian dari hipotesis “Hubungan Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 dengan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang” diperoleh nilai koefisien sebesar 0,66, dan nilai signifikansi

sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan **kuat** dan signifikan antara Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 dengan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

4. Hasil pengujian dari hipotesis “Pengaruh Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang” diperoleh nilai koefisien sebesar 43,9%, sisanya sebesar 56,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak penulis teliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 dengan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis mengenai Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 dan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, penulis mengajukan beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan antara lain :

1. Implementasi Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 perlu diperhatikan lebih baik lagi, dimana berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya tingkat pemeliharaan alat-alat penunjang untuk melaksanakan Implementasi Keputusan Bupati yang rendah, sehingga pegawai kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya, dengan demikian perlu

adanya pemeliharaan peralatan yang dilakukan secara berkala sehingga peralatan penunjang akan lebih terpelihara. Selain itu terdapat pula tingkat pengawasan yang rendah dalam melaksanakan Keputusan Bupati tersebut, Pengawasan diperlukan agar meskipun pegawai melaksanakan WFH, pekerjaan dan tanggungjawabnya tidak terbengkalai, maka perlu dilakukan pengawasan yang rutin terhadap pelaksanaannya.

2. Waktu penyelesaian tugas yang rendah akan menyebabkan terhambatnya pekerjaan lain dan juga menghambat tercapainya program kerja, maka perlu dilakukan kembali penyusunan alternatif terhadap prosedur atau cara penyelesaian tugas yang lebih efektif, hal tersebut dapat dilakukan pula dengan melakukan evaluasi bersama seluruh pegawai dan saling bertukar pendapat mengenai penyelesaian tugas yang lebih efektif.
3. Agar implementasi Keputusan Bupati ini dapat berjalan dengan lancar, baik itu keputusan yang sedang berlaku atau akan berlaku, harus diperkenalkan terlebih dahulu dengan jelas kepada seluruh pegawai agar implementasi suatu keputusan atau kebijakan dapat dilakukan secara maksimal dengan partisipasi seluruh pegawai, sehingga efektivitas kerja pegawai tidak akan terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S., Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdurrahman Fathoni. 2016. *Organisasi & Manajemen Sumber Daya Manusi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Ali, Hasan. 2013. *Marketing dan Kasus-kasus Pilihan*. Yogyakarta: CAPS
- Alma. 2011. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jassa*. Bandung: Alfabeth
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : Pustaka Setia.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Desmita. 2015. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Dunn, William N.. 2010 *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edi, Suharto. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Gie, The Liang. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Hartono J. 2013. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE
- Hasel, Nogi Tangkilisan. 2011. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta: Y.A.P.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ignatius, Wursanto. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Inu, Kencana Syafie. 2010 *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- .

- Iskandar, J. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- Kotler, Philip. 2011. *Manajemen Pemasaran Indonesia (edisi 1)*. Jakarta: Selemba Empat
- Lembaga Administrasi Negara - Republik Indonesia. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Modul Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*. Jakarta: LAN
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2011. *Evaluasi Kinerja SDM*. Jakarta: Refika Aditama.
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayan*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto Erwan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media,
- Richard M. Steers. 2015. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Sedarmayanti, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Setiawan, E., Handayani, D. ., Fadilah, M. R. ., Azizah, N. ., Firdaus, R. ., & Rahmadini, S. . (2020). PENGARUH TATA RUANG KANTOR TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 60-71. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasibelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/53>
- Silalahi, Ulbert. 2016. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Soewarno, Handyaningrat. 2008. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta : Gunug Agung.
- Sondang, P. Siagian 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- STIA Sebelas April Sumedang. 2019. *Panduan Penulisan Skripsi*. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.

- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, Diki. 2017. Pengaruh Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut Nomor 511/Kep.528.Admrek/2015 terhadap Efektivitas Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota. *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Surjana ,Nana, 2004. Pengaruh Koordinasi Tim Pengendalian Kegiatan Terhadap Efektivitas Sistem Pelaporan Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumedang. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang
- Susanto. 2010. *Reputation Drive: Corporate Social Responsibility: Strategic Management dalam CSR*. Jakarta: Erlangga
- Suyaman, Iyos. 2012. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.
- Syamsi, Ibnu. 2004. *Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja*. Jakarta Sinar Grafika.
- Syaukani, dkk. 2016. *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tasmuji, dkk. 2011. *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar*. IAIN SA Press
- Taufik, Mhd. Dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 4, No 2 di unduh dari <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/download/2194/2160> pada 2 februari 2021
- Tjiptono, Fandy. 2017. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winardi. 2003. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana.

Winarno, Budi. 2017. *Globalisasi Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Wursanto. 2011. *Dasar-dasar Ilmu organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset

Yuningsih, Teti. 2020. Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Efektivitas Pencapaian Tujuan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

Dokumen-dokumen

Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.241-HUK/2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

Undang Undang RI No. 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

